

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR**

**(Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

Zidna Azzahra

NIM. 1706016010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Lamp : 4 Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Zidna Azzahra

NIM : 1706016010

Program Studi : Ilmu Politik

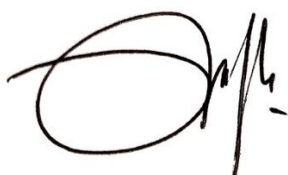
Judul Skripsi :Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus 2021

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si

Pembimbing II



Masrohatun, M.Si

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR**

**(Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah)**

Oleh

Zidna Azzahra

1706016010

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada hari Senin, 27 September
2021 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Sekretaris



Masrohatun, M.Si

Penguji I



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Penguji II



Solkhah Mufrikhah, M.Si

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si

Pembimbing II



Masrohatun, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)*” adalah hasil karya saya pribadi yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Seluruh sumber yang saya jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini telah saya sertakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jika di dalam penulisan skripsi ini terbukti adanya unsur-unsur plagiarisme atau terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Batang, 22 Agustus 2021



Zidna Azzahra

NIM. 1706016010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul ***“Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)”*** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Zaman Jahiliyah ke Zaman Islamiyyah seperti sekarang ini dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin.

Tidak sedikit hambatan yang ditemui penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini juga merupakan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Adib Fathoni, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang yang juga sekaligus sebagai penguji dalam sidang proposal penulis sebelumnya dan yang telah

memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si, selaku Wali Dosen yang juga merupakan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan apresiasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Masrohatun, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan tidak berhenti membangun rasa percaya diri penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Segenap Civitas Akademika Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam mendapatkan keperluan yang dibutuhkan pada penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Kusrin dan Ibu Nur Aenah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan secara moral maupun materiil yang tidak terhingga, serta doa yang tidak hentinya dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam segala hal termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Khuzaeni, Ibu Endang, Ibu Betris, Bapak Ilham, dan Ibu Yani, selaku informan penelitian yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Hakim Junaidi, M.Ag, & Ibu Mutiah, S.Ag, dan segenap kawan-kawan Pondok Pesantren Bina Insani Semarang, selaku keluarga ideologis yang telah memberikan pelajaran hidup, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga dapat menghadapi dunia perkuliahan dengan penuh persiapan.
12. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Bidikmisi Community Walisongo (BMC), dan Koperasi Mahasiswa Walisongo

(Kopma) yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman berharga kepada penulis dalam berproses di organisasi.

13. Choerunnissa', Amd.Keb, dan Khafisah Zanuba selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Gita Dwi Jayanti dan Puspa Savitri Edelwise Putri, selaku kawan baik penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan baik dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi pelajaran bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Batang, 22 Agustus 2021

Penulis



Zidna Azzahra

NIM. 1706016010

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim serta mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Kusrin dan Ibu Nur Aenah yang telah mencurahkan segala doa baik serta dukungan yang tidak ternilai harganya selama hidup saya.

Kedua dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si, dan Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi kepada saya agar selalu semangat dalam berproses.

Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya banggakan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu dan potensi.

MOTTO

“Dan kehidupan dunia tidak lain adalah permainan dan senda gurau.....”

(QS. Al-An'am ayat 32)

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”

(Tan Malaka)

“You are the main character in your life”

(Kim Dong-young)

ABSTRAK

Pentingnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam manifestasi kesetaraan dan keadilan gender pada pembangunan di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selaras dengan hal tersebut, usaha peningkatan peran perempuan dalam pembangunan ditujukan pada usaha untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas dan kemandirian, kemajuan SDM, mendorong serta meningkatkan peran swadaya masyarakat secara aktif. Salah satu upaya pemerintah dengan masyarakat untuk memberdayakan potensi SDM dan SDA di masing-masing wilayah adalah melalui pembentukan program pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara, Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber data. Adapun teknik analisis data mencakup pada empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun pada dasarnya semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemberdayaan, namun perempuan dalam hal prosentase kehadiran dan keaktifannya hanya mendominasi pada tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi sejauh ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Pemerintah, Program Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

The importance of community participation, especially women in the manifestation of gender equality and justice in development in Indonesia is stated in Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development. In line with this, efforts to increase the role of women in development are aimed at efforts to alleviate poverty, improve quality and independence, progress human resources, encourage and increase the role of self-help actively. One of the government's efforts with the community to empower the potential of human resources and SDA in each region is through the establishment of community empowerment programs.

This study uses qualitative method with case study approach to describe and know how women participate in community empowerment program in Karangasem Utara Village, Batang Regency. Data collection techniques are conducted by means of observation, interview, and documentation. The validity of the data used is a data triangulation technique that utilizes the use of data sources. The data analysis techniques include four things, namely data collection, data reduction, as well as data presentation and conclusion drawing.

The observations and interviews in this study show that the form of community empowerment program in Karangasem Utara Village is Empowerment Training and Joint Venture Group (KUB). Women's involvement in community empowerment is noted in the planning, implementation, and evaluation process. Although basically all societies have the same rights and opportunities in the empowerment process, women in terms of percentage of presence and activity only dominate at the stage of implementation. While at the planning and evaluation stage is still dominated by men so far.

Keywords: Women's Participation, Government, Community Empowerment Program.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sumber dan Jenis Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Partisipasi.....	23

B. Pemberdayaan Masyarakat	24
----------------------------------	----

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kelurahan Karangasem Utara	28
B. Kondisi Demografis Kelurahan Karangasem Utara	29
C. Kondisi Sosial Penduduk Kelurahan Karangasem Utara	31
D. Kondisi Ekonomi Kelurahan Karangasem Utara.....	34

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat	36
1. Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.....	36
2. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Batang	43
3. Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	46
B. Keterlibatan Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	52
1. Aktivitas Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara	52
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.....	59
3. Manfaat yang diperoleh Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara	69
C. Kesetaraan Akses dan Kontrol Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.....	71
1. Akses Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara	71
2. Kontrol Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
---------------------	----

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	82
CURRICULUM VITAE	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian	15
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	16
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Agama di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018	30
Tabel 4.3 Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018	31
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ekonomi dan Perdagangan di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Analisis Data	19
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Karangasem Utara.....	28
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kelurahan Karangasem Utara.....	28
Gambar 4.3 Grafik Produksi Ikan di TPI Klidang Lor I Kelurahan Karangasem Utara Batang 2021	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana yang beragam dan berbagai program pembangunan sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintahan dilaksanakan di berbagai tingkatan wilayah mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Program-program tersebut diharapkan bisa melatih kemandirian masyarakat terlebih program pemberdayaan yang diinisiasi khusus untuk mengarah pada tujuan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah tahapan dalam masyarakat khususnya yang tidak mempunyai akses ke sumber daya pembangunan, didukung untuk meningkatkan independensi terhadap pengembangan aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai tahapan siklus berkelanjutan, tahapan partisipatif antara masyarakat yang bekerjasama. Sehingga pemberdayaan masyarakat lebih dimaknai sebagai sebuah tahapan atau proses (Aziz, dkk, 2005: 136).

Partisipasi dari semua elemen masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang akan melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan tercipta sebuah rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemberdayaan itu sendiri. Selain itu masyarakatlah yang lebih paham mengenai keadaan dan kebutuhan mereka sehingga program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan hal tersebut.

Keikutsertaan masyarakat pada implementasi suatu program pembangunan sudah pasti dibutuhkan karena merekalah yang kemudian akan mengerjakan program tersebut. Dilibatkannya masyarakat dalam program akan memunculkan sikap tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap kesinambungan program pembangunan (Suparjan, 2003: 53).

Dalam hal ini terlihat bahwa peran aktif masyarakat adalah suatu hal fundamental yang wajib dilakukan supaya implementasi pembangunan dapat berjalan tanpa halangan dan seperti yang telah direncanakan. Peran aktif tersebut pastinya bukan hanya untuk kaum laki-laki saja tetapi juga untuk kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan mempunyai kedudukan seperti yang dimiliki laki-laki. Dalam bukunya, Ratna Megawangi (1999) menuliskan bahwasannya peran laki-laki dan perempuan secara nature memang tidak bisa dipertukarkan, namun peran nurture atau peran hasil dari konstruksi sosial budaya sangat bisa untuk dipertukarkan. Peran domestik dan publik merupakan bagian dari peran nurture. Hanya saja konstruksi budaya yang selama ini berkembang, dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral untuk diyakini.

Pada dasarnya perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana laki-laki. Perempuan berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang baik ranah domestik maupun publik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Peran laki-laki dan perempuan yang seimbang dibutuhkan dalam hal pembangunan. Namun realita di Indonesia, masyarakat mengkonstruksi pembagian kerja berdasarkan gender bahwa peran perempuan hanya sebatas urusan domestik sedangkan laki-laki bebas di ranah publik sehingga hal ini

menyebabkan subordinasi perempuan. Salah satu contohnya adalah dalam hal pengambilan suatu keputusan kebijakan. Umumnya suara laki-laki yang dipentingkan, padahal kebijakan tersebut wajib diterapkan bukan hanya kepada laki-laki tetapi juga perempuan karena di dalam anggota masyarakat terdapat laki-laki dan perempuan (Astuti, 2011: 114).

Program pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh pemerintah di setiap daerah tentunya berbeda; karena suatu program harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, potensi alam, dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga salah satu mata pencaharian masyarakatnya ada di bidang perikanan. Salah satu wilayah perairan di Indonesia yang memanfaatkan potensi lautnya adalah Kelurahan Karangasem Utara di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Daerah ini dikenal masyarakat setempat karena terdapat berbagai olahan hasil laut khususnya pengolahan ikan.

Kelurahan Karangasem Utara secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang yang menjadi pusat pembangunan industri dan perikanan. Karena wilayahnya terletak di dekat pantai, pelabuhan ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka daerah tersebut dapat dikatakan sangat potensial menjadi kawasan industri pengolahan hasil laut. Menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017, pada tahun 2005 jika dilihat dari mata pencaharian penduduk di bidang perikanan di Kelurahan Karangasem Utara tercatat berjumlah 1.396 orang laki-laki dan perempuan serta menjadi jumlah terbesar di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Berkaitan dengan hal ini terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki bertugas untuk pergi mencari hasil laut, sedangkan perempuan bertugas untuk mengolah hasil laut tersebut.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak berhenti merumuskan kebijakan serta menciptakan sejumlah program pemberdayaan, termasuk program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah tingkat kelurahan. Seperti yang

tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Pasal 4 Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang, bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah menjadikan Kelurahan Karangasem Utara mempunyai berbagai macam olahan hasil laut. Beberapa macam olahan hasil laut tersebut antara lain olahan ikan asin, ikan pindang, fillet ikan, tepung ikan, ikan panggang, rajungan, teri rebus, ikan asap, kerupuk ikan, terasi. Selain hasil laut yang telah diolah, terdapat juga hasil laut yang tidak diolah yaitu ikan segar. Namun dalam hal ini masyarakat belum memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal karena olahan hasil laut tersebut hanya dijual secara langsung di sekitar wilayah Kabupaten Batang saja.

Melihat realitas bahwa Kelurahan Karangasem Utara menjadi salah satu pusat produksi olahan hasil laut di Kabupaten Batang dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terlibat di dalamnya, serta partisipasi perempuan dalam hal pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat menciptakan persepsi yang berbeda antara individu, maka penulis ingin meneliti bagaimana para perempuan menggunakan kesempatan yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang?
2. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang?
3. Bagaimana perempuan memiliki kontrol dan kesetaraan (*control and equality*) dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang?

C. Tujuan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan keterangan tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat, dan secara rinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
2. Untuk memahami bagaimana keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
3. Untuk mengidentifikasi apakah perempuan memiliki kontrol & kesetaraan (*control and equality*) dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

D. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta dapat memperluas wawasan mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai gambaran untuk pemerintah Kabupaten Batang maupun masyarakat secara luas apakah sejauh ini perempuan telah ikut berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Dapat memberikan kritik, serta bahan referensi untuk penelitian maupun studi-studi selanjutnya mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian maupun kajian yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini penulis merujuk pada beberapa penelitian dan kajian antara lain:

Skripsi karya Anggraeni Munggi Lestari tahun 2013 dengan judul *“Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk, faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, serta implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas-aktivitas tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi; faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan bersumber pada faktor internal dan eksternal; serta implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subjek pembangunan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan

melalui PNPM Mandiri Perkotaan, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Skripsi karya S. Darmadi tahun 2010 dengan judul *“Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi Jalan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan seperti betonisasi, dalam program PNPM-MP di RT 01 dan RT 02 RW IV Ngares Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya tindakan sosial perempuan dalam berpartisipasi melewati proses perencanaan yaitu memberikan gagasan dan menentukan pengambilan keputusan, pelaksanaan yaitu dengan memberikan bantuan waktu, tenaga, dan pikiran, pemanfaatan yaitu dengan dengan membangun dan menggunakan infrastruktur yaitu betonisasi.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan pada program PNPM-MP, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Skripsi karya Malia Munafatunnisa tahun 2019 dengan judul *“Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Simpan Pinjam bagi Perempuan di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang)”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam kegiatan yang ada

di Simpan Pinjam bagi Perempuan di Desa Mereng, kebutuhan praktis dan strategis perempuan yang telah dipenuhi oleh program Simpan Pinjam bagi perempuan, dan tingkat keberdayaan perempuan yang mengikuti program Simpan Pinjam bagi Perempuan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengikuti program Simpan Pinjam bagi perempuan sudah aktif dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; kebutuhan praktis perempuan yang terpenuhi yaitu pemberian pinjaman modal untuk berwirausaha, bantuan dana sosial, dan bantuan alat untuk menunjang wirausaha perempuan, serta kebutuhan strategis perempuan yang telah terpenuhi yaitu adanya kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi perempuan; tingkat keberdayaan perempuan yang mengikuti program Simpan Pinjam bagi perempuan sudah mencapai pada tingkat kontrol.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap Program Simpan Pinjam bagi perempuan, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Skripsi karya Novita Kurniawati tahun 2017 dengan judul "*Partisipasi Perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, dalam menerima manfaat, dan dalam evaluasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum partisipasi perempuan telah berjalan dengan baik dan bahkan terjadi peningkatan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada partisipasi perempuan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS), dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya Tisa Juniarti tahun 2017 dengan judul "*Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*". Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan gambaran faktual tentang partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan pernah mengikuti program PMBRW khususnya dalam pelaksanaan pelatihan di Kabupaten Tuah Karya.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW), dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya E. Yuningtyas Setyawati dan Andreas A. Susanto tahun 2013 dengan judul "*Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah

dilibatkan dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, namun keterlibatan perempuan tersebut belum optimal karena masih bersifat pasif. Sedangkan faktor pendukung proses pemberdayaan perempuan adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program serta anggota perempuan tim pelaksana tingkat desa mempunyai kemauan untuk belajar, dan faktor penghambatnya antara lain adalah belum adanya kesepakatan di dalam internal antar pelaksana di tingkat desa dan pelaksana dengan pemerintah kabupaten.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam implemetasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul secara umum, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya Ikhsan Muharma Putra tahun 2015 dengan judul "*Partisipasi Semu Perempuan Miskin dalam Program Pemberdayaan Masyarakat*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan miskin dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat nasional masih terlihat, namun terdapat dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan pada proses pembangunan partisipatif yang mengakibatkan partisipasi perempuan miskin ternyata palsu.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan miskin dalam PNPM-Pedesaan, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap

partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya M Hery Amrizal, Darsono Wisadirana, dan Sanggar Kanto tahun 2016 dengan judul “*Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam PNPM-MP, faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan, serta implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan dalam PNPM-MP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di dalam PNPM-MP di Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sudah terimplementasikan dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM-MP, ditemukannya berbagai macam faktor pendorong dan penghambat baik internal maupun eksternal, serta implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subjek pembangunan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam penanggulangan kemiskinan pada program PNPM-MP, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya Rini Rinawati tahun 2004 dengan judul “*Partisipasi Wanita dalam Pembangunan (Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat)*.”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam pembangunan partisipatif serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengaplikasiannya di lapangan, partisipasi perempuan pada pembangunan partisipatif terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya hambatan yang ditemui seperti halnya kesiapan, kebiasaan, dan kesediaan dalam mengikutsertakan diri pada tahapan pembangunan partisipatif.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan pada pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan hambatan yang dilalui, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya Hettiarini tahun 2016 dengan judul "*Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dan faktor pendorong serta penghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan KSM PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Dompok. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan KSM PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Dompok sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tindakan yang telah dilakukan seperti halnya turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil kegiatan, dan pemberian penilaian tetapi partisipasinya hanya sebatas keanggotaan karena masih adanya dominasi oleh kaum laki-laki serta beban ganda yang dimiliki perempuan yang memungkinkan dapat menyita waktu anggota kelompok. Faktor pendorong dan penghambat dalam hal ini bersumber dari faktor internal dan eksternal.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan KSM PNPM Mandiri Perkotaan, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian karya Emilia Ramadhani tahun 2011 dengan judul "*Peran Perempuan dalam Mengembangkan Program Pemberdayaan Perempuan melalui Multimedia (Studi Pendekatan Filantropi pada Akademisi Perempuan di Kota Medan)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk menyatukan gagasan yang akan dikembangkan dalam gerakan akademisi perempuan Indonesia menuju program pemberdayaan perempuan melalui media. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akademisi sepakat untuk menyatukan gagasannya melalui gerakan akademisi perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu juga, kegiatan yang dilakukan akademisi perempuan selama ini hanya sebatas kegiatan bersama LSM dan untuk sumbangan gagasan sendiri terbilang sangat rendah. Kemudian media yang dianggap tepat untuk dijadikan sarana untuk menyalurkan gagasan tentang perempuan adalah berupa website multimedia, dalam hal ini dibuat domain gap-indonesia.org.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis ajukan adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus terhadap pengembangan program pemberdayaan perempuan melalui multimedia, dan penelitian yang penulis ajukan adalah fokus terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir dan melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Berdasarkan pada perbedaan yang telah diuraikan di atas, kajian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)” berbeda dengan penulisan penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan mengetahui sebuah peristiwa tertentu pada aspek sosial secara wajar serta memfokuskan pada proses hubungan komunikasi yang intensif oleh peneliti dan peristiwa yang ditelaah. Sehingga pada penelitian kualitatif peneliti disebut dengan instrumen (Moleong, 2006).

Terdapat beberapa macam pendekatan di dalam penelitian kualitatif antara lain biografi, fenomenologi, *grounded theory study*, studi kasus, dan etnografi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam menggali data kualitatif. Adapun menurut Creswell (2017) studi kasus adalah strategi penelitian untuk menyelidiki dengan cermat suatu hal melalui pengumpulan informasi secara lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam serta menganalisa dengan lebih intensif mengenai suatu hal dalam program, peristiwa, aktivitas, proses, individu, kelompok, maupun situasi.

Penelitian ini memfokuskan atas bahan yang ditelaah di lapangan dengan suatu cara tertentu, selanjutnya direfleksikan pada sebuah kalimat serta mengklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus dan selanjutnya ditarik sebuah konklusi. Dengan begitu pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan serta menguraikan sesuai dengan fakta-fakta secara realistis mengenai “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus

di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)”.
di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)”).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan yang didapatkan secara langsung melalui sumber informasi (informan) dan juga catatan lapangan yang linear dengan persoalan yang dikaji. Pada penelitian ini, penulis memilih informan-informan yang dinilai menguasai permasalahan, mempunyai data dan juga bersedia membagikan informasi data kepada penulis.

Pada penelitian ini data primer didapatkan dengan cara *interview* bersama informan yang telah dipilih dengan berdasarkan panduan wawancara mengenai Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah). Wawancara dilakukan pada informan yang dinilai mempunyai data yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1.) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan perempuan di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang turut terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program-program yang dirancang oleh pemerintah Kelurahan Karangasem Utara, dan dengan pertimbangan bahwa perempuan yang menjadi bagian dari program pemberdayaan tersebut adalah pihak yang betul-betul terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Tabel. 3.1

Daftar Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Peran dalam Program
----	------	------	-----------	---------------------

1.	Asanah	46 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
2.	Danumi	63 Th	Pedagang	Anggota/Tenaga Kerja
3.	Dwi	39 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
4.	Hasta	41 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
5.	Mufidah	37 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
6.	Mutamimmah	37 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
7.	Nur Hayati	37 Th	Pedagang	Anggota/Tenaga Kerja
8.	Nursiyam	44 Th	ART	Anggota/Tenaga Kerja
9.	Pawit	52 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
10.	Puji	46 Th	Buruh	Anggota/Tenaga Kerja
11.	Sayuti	63 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
12.	Setyowati	28 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
13.	Siti	54 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
14.	Sukoningsih	45 Th	-	Anggota/Tenaga Kerja
15.	Rahmayani	41 Th	Pedagang	Anggota/Tenaga Kerja

Sumber: Data Penelitian 2021

2.) Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang mengetahui dan paham mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara. Wawancara dilakukan dengan informan untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.

Tabel. 3.2

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Khuzaeeni	Lurah
2.	Endang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

3.	Betris	Penanggung Jawab RT 01/ RW 09 Dukuh Wukirsari
4.	Ilham	Kepala Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan
5.	Yani	Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan

Sumber: Data Penelitian 2021

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang digunakan peneliti dalam bentuk dokumen-dokumen yang dicatat oleh lembaga, laporan-laporan maupun bahan lainnya yang linear dengan penelitian ini. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung dan dibutuhkan untuk menyempurnakan data primer yang didapatkan sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini bisa saja dalam bentuk arsip atau data dari pemerintahan, termasuk data kebijakan pembangunan desa, serta data grafik ataupun diagram yang linear dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka penulis menerapkan teknik berikut, yaitu:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang tepat mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara. Teknik pengamatan ini dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti. Pengamatan serta penelitian dilakukan kurang lebih dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2021 hingga bulan Juli 2021. Namun sebelum dilakukan pengamatan dan penelitian mendalam, penulis terlebih dahulu melakukan pra-penelitian untuk merumuskan masalah dan mengembangkan

kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk memudahkan pengamatan seperti catatan kecil dan gawai.

Pengamatan dalam penelitian ini diawali dengan mengamati kondisi lingkungan Kelurahan Karangasem Utara, melihat data mengenai jumlah penduduk serta sarana dan prasarana yang tersedia. Setelah itu penulis juga mengamati proses pengolahan hasil laut yang menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode akumulasi data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan serta dilakukan dengan cara pertemuan langsung. Data yang didapatkan dari wawancara tersebut kemudian akan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan realita yang terjadi. Wawancara akan dilakukan dengan informan aparatur pemerintah di lingkungan Kelurahan Karangasem Utara, serta kelompok masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Informan yang ditentukan didasarkan pada pengetahuannya terhadap partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan gawai untuk merekam percakapan dengan informan, *notebook* untuk mencatat jawaban dari informan, serta pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menguraikan permasalahan yang ada. Wawancara untuk penelitian ini diawali dengan menemui aparatur pemerintah Kelurahan Karangasem Utara yaitu Lurah serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada hari Selasa, 15 Juni 2021 di Kantor Kelurahan Karangasem Utara yang berlokasi di Jalan RE. Martadinata No. 233 Batang.

Wawancara lainnya dilakukan dengan penanggung jawab pemberdayaan perempuan di wilayah Klidang Lor pada hari Kamis, 17 Juni 2021 di tempat pengolahan hasil laut yaitu fillet dan penggilingan ikan.

Untuk mendapatkan informasi mendalam pada subjek dan informan, wawancara dilakukan dengan cara menemui orang-orang tersebut secara bergantian satu per satu.

c. Dokumentasi

Penulis mengakumulasikan, membaca, serta mendalami beberapa bentuk data seperti halnya data tertulis, pengumpulan gambar, serta data-data dari instansi terkait yang dapat digunakan sebagai kajian untuk hasil pada penelitian ini (Moleong, 2006: 39).

Dokumentasi digunakan untuk menunjang dan melengkapi data-data dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen mengenai data seputar lokasi penelitian baik lingkungannya maupun masyarakatnya yang diperoleh di Kantor Kelurahan Karangasem Utara. Dalam penelitian ini juga digunakan buku-buku literatur penunjang skripsi dan foto-foto.

4. Teknik Analisis Data

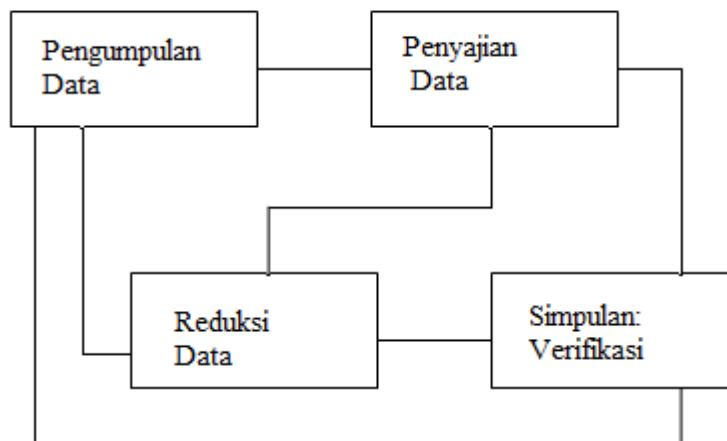
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui fokus analisa atau evaluasi dengan komprehensif pada data yang didapatkan melalui proses pengamatan, wawancara, serta dokumentasi dari berbagai informan, dan beberapa data pelengkap yang didapatkan, dideskripsikan dari pandangan peneliti tanpa mengurangi substansi maupun makna dari data tersebut, dan juga kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis dari temuan penelitian.

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara pengamatan, wawancara, serta dokumentasi, hal yang dilakukan kemudian yaitu membaginya berdasarkan pada persoalan yang diteliti dan setelah itu dilakukan penyusunan data serta dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif.

Analisis data pada penelitian berjalan secara beriringan dengan tahapan akumulasi data. Di antaranya melalui tiga proses model air, adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tetapi ketiga proses tersebut berjalan dengan beriringan (Bungin, 2001: 144). Analisis data divisualisasikan seperti gambar di bawah ini:

Gambar. 3.1

Proses Analisis Data



Sumber: Bungin, 2001

a. Pengumpulan Data (*Data Collected*)

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat seluruh data secara objektif serta apa adanya sesuai dengan yang diperoleh di lokasi penelitian. Melalui pengumpulan data, didapatkan data dari Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara, perempuan yang terlibat sebagai penanggung jawab pemberdayaan perempuan di salah satu rukun tetangga (RT), dan perempuan yang terlibat dalam kelompok usaha bersama (KUB).

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data digunakan untuk memilah data yang telah terkumpul, kemudian data dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah

terkumpul dari hasil observasi serta wawancara direduksi atau dipilah kembali dengan tujuan untuk mendapatkan data yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang hasil observasi dan wawancara serta memudahkan penulis untuk mencarinya lagi jika suatu saat diperlukan kembali. Proses pemilihan data setelah observasi dan wawancara yang diperoleh adalah mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang didapatkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi mengenai kondisi demografi masyarakat Kelurahan Karangasem Utara diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan melalui proses analisis, berisikan tentang seluruh masalah yang dikaji dan sesuai dengan fokus penelitian yaitu partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara.

d. Simpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dari data yang telah dikelompokkan sebelumnya dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang serta disajikan sesuai topik permasalahan yang ada. Data mengenai partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ini kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai bahan pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan skripsi yang sistematis, maka susunan penulisan skripsi dibagi ke dalam lima (5) bab yang terdiri atas sub-sub bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** **PENDAHULUAN:** Isi dari Bab Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** **KERANGKA TEORI:** Dalam bab ini, penulis membahas mengenai teori partisipasi dan teori pemberdayaan masyarakat.
- BAB III** **METODE PENELITIAN:** Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang kondisi geografis dan demografis Kelurahan Karangasem Utara, serta kondisi sosial dan ekonomi penduduk Kelurahan Karangasem Utara.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bab ini terdiri atas 3 (tiga) poin yaitu (a) bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berisi tentang bentuk program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, dan strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara; (b) keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat yang berisi tentang aktivitas perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat, serta manfaat yang diperoleh perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara; (c) kesetaraan akses dan kontrol perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat yang berisi tentang akses dan kontrol perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara.
- BAB V** **PENUTUP:** Berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Partisipasi

Menurut Huneryager dan Heckman, partisipasi merupakan keterkaitan secara mental dan emosional seseorang pada keadaan kelompok yang mendukungnya untuk ikut menyumbang terhadap misi kelompok dan membagi tanggung jawab bersama kelompok tersebut (Dwiningrum, 2011: 51).

Sedangkan menurut Mubyarto (1985) dalam (Lugiarti, 2004: 8) partisipasi adalah pemahaman untuk menolong terwujudnya suatu program yang berdasarkan pada kompetensi tiap individu dengan tidak mementingkan urusan pribadi. Partisipasi sangatlah berguna pada suatu pembangunan dikarenakan pembangunan adalah aktivitas yang berkelanjutan. Di dalam suatu pembangunan semacam itu diperlukan keikutsertaan banyak orang. Hal tersebut berarti jika tidak adanya keikutsertaan semua elemen masyarakat maka pembangunan akan sulit terlaksana secara maksimal.

Sementara itu Britha Mikkelsen mengkategorikan partisipasi dalam enam (6) pengertian antara lain: (Mikkelsen, 2011: 58)

- a. Partisipasi merupakan keikutsertaan oleh masyarakat secara sukarela pada suatu pekerjaan dengan tidak ikut andil pada pengambilan keputusan,
- b. Partisipasi merupakan penyadaran elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesediaan dalam menampung serta menyepakati berbagai macam proyek pembangunan,
- c. Partisipasi merupakan keikutsertaan oleh masyarakat secara sukarela terhadap suatu transformasi yang telah ditetapkan,
- d. Partisipasi merupakan sebuah tahapan aktif yang mengartikan bahwa individu maupun kelompok yang terikat serta membuat

inisiatif dan melakukan hal tersebut dengan menggunakan kebebasannya,

- e. Partisipasi merupakan pengukuhan perundingan oleh masyarakat bersama dengan pihak aparaturnya yang mengatur persiapan, pelaksanaan, serta monitoring pekerjaan tersebut agar mendapatkan informasi terkait dengan keadaan lokal maupun pengaruh-pengaruh sosial,
- f. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat pada pembangunan diri, kehidupan, serta lingkungan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, Beetham (2000) menekankan makna penting dari partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi tidak hanya berhenti pada urusan memberikan suara dalam Pemilu saja, tetapi masyarakat juga mempunyai kontrol yang luas dalam proses pemilihan ataupun saat berlangsungnya pemerintahan. Demokrasi diartikan ke dalam dua hal yaitu kedaulatan rakyat (*rule of the people*) yang lebih spesifik diartikan sebagai kontrol populer (*popular control*), dan kesetaraan politik (*political equality*). David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan pengertian demokrasi yang dikutip oleh Jayadi Nas dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep Teori dan Aplikasinya” (Nas, 2000: 19-20) menegaskan perihal kesetaraan partisipasi politik dalam demokrasi adalah bahwa demokrasi merupakan salah satu dari asset pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi asosiasi secara utuh harus diambil oleh seluruh anggotanya serta masing-masing anggota tersebut harus memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan pengambilan atau pembuatan keputusan. Artinya, demokrasi melingkupi prinsip kontrol masyarakat terhadap proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kontrol tersebut.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sekumpulan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kemampuan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk pula orang-orang yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai cita-cita, maka dari itu pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang ingin diraih oleh suatu perubahan sosial; adalah masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan dan pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kehidupannya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai rasa percaya diri, dapat menyuarakan gagasan, mempunyai pekerjaan, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan kewajiban di kehidupannya (Suharto, 2014: 59-60).

Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu tahapan membangun individu maupun kelompok melalui cara pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan tindakan masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat. Fungsi pemberdayaan dan perannya terhadap pembangunan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan sekarang ini semakin terasa. Program pemberdayaan tidak dapat dikerjakan hanya pada satu siklus saja dan selesai diproses tertentu, namun harus selalu berkelanjutan serta kualitasnya terus meningkat dari satu proses ke proses selanjutnya (Mubarak, 2010).

Pemberdayaan masyarakat juga searah dengan antusias Islam serta umatnya untuk menciptakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam mempunyai tujuan supaya umatnya menjadi bagian dari penebar rahmat Allah di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Selain itu, Islam mendukung implementasi pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada 3 prinsip utama yaitu; prinsip ukhuwah, prinsip

ta'awun, dan prinsip persamaan derajat. Prinsip Ukhuwah atau persaudaraan didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Kedua yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ketiga adalah prinsip persamaan derajat yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf Ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membag-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dalam implementasi tujuan pemberdayaan dibutuhkan adanya kerjasama antara elemen masyarakat dengan pemerintah. Peran pemerintah

dapat dilakukan melalui sebuah kebijakan yang dapat menciptakan sebuah program maupun kegiatan pembangunan secara terpadu (Jenawi, 2016).

Aspek pokok di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi kaum miskin, perempuan buta huruf serta kelompok terbelakang lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat dan memperhatikan dampak lingkungan, tidak membuat ketergantungan, berbagai pihak dikaitkan, dilibatkan, dan berkesinambungan (Mardikanto dan Poerwoko, 2013: 62).

Menurut Putnam dalam Jim Ife dan Frank Tesoriero (2006: 363) mengatakan bahwa semua pengembangan masyarakat sebaiknya mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat mengikutsertakan pengembangan modal sosial, penguatan interaksi sosial pada masyarakat, menyatukan masyarakat, dan membantu masyarakat untuk saling berkomunikasi melalui cara yang dapat menuju pada percakapan yang murni, pemahaman dan aksi sosial. Hilangnya komunitas telah berakibat pada disintegrasi, isolasi, dan individualisasi. Dan dalam hal ini pengembangan masyarakat berusaha memulihkan dampak-dampak tersebut. Pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan apabila pembentukan struktur dan proses tingkatan masyarakat yang baik dan langgeng ingin diraih.

Teori penelitian tentang partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ini mengacu pada teori konsep David Beetham yang memfokuskan pada kesetaraan hak dalam mengakses dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan dan dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kelurahan Karangasem Utara

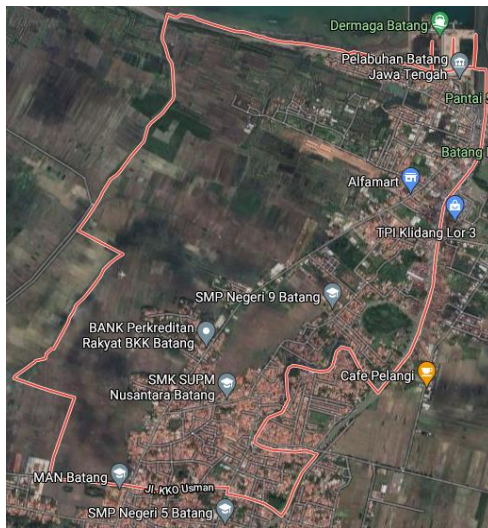
Kelurahan Karangasem Utara adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kelurahan Karangasem Utara terletak di antara 6,89580 garis lintang selatan dan 109,73910 garis bujur timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan Batang ke Kantor Kelurahan Karangasem Utara adalah sejauh 5 Km dengan alamat kantor kelurahan berada di Jalan RE. Martadinata No. 233. Kelurahan Karangasem Utara mempunyai wilayah dengan luas 287,31 Ha. Dari luas wilayah tersebut, seluas 139,50 Ha di antaranya adalah berupa tanah persawahan. Sementara seluas 147,81 lainnya berupa tanah kering dan sebagian besarnya dimanfaatkan untuk pekarangan atau bangunan. Kelurahan Karangasem Utara terdiri dari 16 Dusun, 9 RW, dan 44 RT.

Kelurahan Karangasem Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara: Kelurahan Karangasem Selatan
2. Selatan: Kelurahan Proyonanggan Tengah
3. Barat: Kelurahan Kasepuhan
4. Timur: Kelurahan Karangasem Selatan

Gambar. 4.1

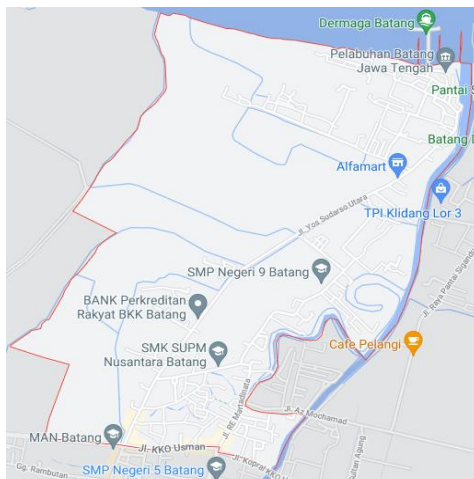
Peta Wilayah Kelurahan Karangasem Utara



Sumber: Google Maps Kelurahan Karangasem Utara 2021

Gambar. 4.2

Peta Wilayah Kelurahan Karangasem Utara



Sumber: Google Maps Kelurahan Karangasem Utara 2021

B. Kondisi Demografis Kelurahan Karangasem Utara

Ditinjau dari kebutuhan pokok pembangunan maka jumlah penduduk yang besar adalah sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan produktif untuk kelangsungan suatu pembangunan masyarakat di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di satu sisi menjadi tambahan untuk persediaan tenaga kerja berlawanan dengan terbatasnya tanah dan kesempatan kerja di beberapa sektor. Hal tersebut menimbulkan peningkatan

tekanan tenaga kerja dan menyebabkan problematika dalam hal fenomena ketenagakerjaan dan pendapatan penduduk.

Berdasarkan dari hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk di Kelurahan Karangasem Utara pada tahun 2016 adalah sebanyak 14.239 jiwa. Dari hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu 2016-2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 4.88/Km² dan pada tahun 2018 menjadi 4.948/Km². Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak dibersamai dengan pemerataan penyebaran penduduk di desa/kelurahan.

Tabel. 4.1

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018

Kelompok Usia	Jumlah
0-9 tahun	2.152
10-14 tahun	1.157
15-19 tahun	1.412
20-24 tahun	1.525
25-29 tahun	1.286
30-34 tahun	994
35-39 tahun	997
40-44 tahun	949
45-49 tahun	925
50-54 tahun	946
55+	1.896
Jumlah	14.239

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP2010

Tabel. 4.2

**Jumlah Penduduk menurut Agama di Kelurahan Karangasem
Utara Tahun 2018**

Agama	Jumlah
Islam	14.180
Kristen/Protestan	46
Katolik	12
Hindu	0
Budha	1
Jumlah	14.239

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP2010

Kelurahan Karangasem Utara mempunyai penduduk berjumlah 14.239 jiwa, dan dari jumlah tersebut sebanyak 7.176 jiwa adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan sejumlah 7.063 jiwa adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Karangasem Utara didominasi oleh anak-anak usia 0-9 tahun dengan jumlah mencapai angka 2.152 jiwa. Dengan luas wilayah 287.31 Ha dan jumlah penduduk sebesar 14.031 jiwa maka dapat dikalkulasikan bahwa kepadatan penduduk di Kelurahan Karangasem Utara adalah 49/Ha.

C. Kondisi Sosial Penduduk Kelurahan Karangasem Utara

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan bersosial, serta pranata sosial yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan keluarga menjadi salah satu media untuk mengatur individu dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Keluarga sebagai unit pembangunan yang dapat membangun setiap anggotanya. hal ini dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Terwujudnya keluarga sejahtera merupakan hal pokok terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dan berikut adalah data perkembangan keluarga sejahtera di Kelurahan Karangasem Utara tahun 2018.

Tabel. 4.3

**Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Karangasem
Utara Tahun 2018**

Pra Sejahtera	Prosentase	Sejahtera I	Prosentase	Sejahtera II	Prosentase
607	13,74%	1.237	28,01%	377	44,46%
Jumlah Keluarga			4.417		

Sumber: Balai Penyuluh KB Kecamatan Batang

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 6 (enam) indikator sebuah keluarga sejahtera. 6 indikator tersebut merupakan kebutuhan dasar keluarga atau *basic needs*, yaitu: anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian; rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik; jika ada anggota keluarga yang sakit, maka dapat dibawa ke sarana kesehatan; jika pasangan usia subur menginginkan KB, maka dapat pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga dapat bersekolah.

Jika sebuah keluarga dapat mencukupi 6 indikator tersebut maka dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera. Sedangkan jika dapat memenuhi lebih dari 6 indikator dasar, maka keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera 1. Namun jika sebuah keluarga belum bisa mencukupi 6 indikator dasar tersebut, maka dapat dikatakan sebagai keluarga pra sejahtera. Dapat dilihat bahwa prosentase keluarga pra sejahtera lebih sedikit dibandingkan dengan prosentase keluarga sejahtera 1&2. Maka, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Karangasem Utara mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup masing-masing.

Salah satu indikator dasar keluarga sejahtera adalah anak usia 7-15 tahun dapat bersekolah. Dan tidak dapat dihindari bahwa peningkatan

kualitas pendidikan menjadi faktor utama dalam suatu pembangunan di Indonesia baik jika dilihat dari perspektif penduduk sebagai objek pembangunan ataupun sebagai subjek pembangunan. Salah satu wujud keberhasilan suatu pembangunan di sebuah wilayah dapat ditunjukkan dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Hal ini tentunya tidak lepas dari kualitas sarana pendidikan yang tersedia di wilayah tersebut.

Berdasarkan dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tahun 2018/2019, di Kelurahan Karangasem Utara terdapat 3 Taman Kanak-kanak (TK) Swasta, 8 Sekolah Dasar (SD) Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, 1 Madrasah Tsanawiyah (MTS) Swasta, 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting dan perlu adanya perhatian dari semua pihak baik masyarakat sipil maupun pemerintah. Peran pemerintah dalam hal pembangunan kesehatan masyarakat salah satunya adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana kesehatan. Kesiapan sarana dan prasarana kesehatan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan medis. Berdasarkan data dari Puskesmas Kecamatan Batang tahun 2018, terdapat 16 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menurut stratanya masing-masing yaitu 2 Madya, 12 Purnama, dan 2 Mandiri. Selain Posyandu, terdapat juga Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa 1 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 1 Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Selain sarana pendidikan dan kesehatan, di Kelurahan Karangasem Utara juga terdapat sarana ibadah berupa 4 masjid dan 29 mushola. Berdasarkan dari tabel jumlah penduduk sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Karangasem Utara merupakan seorang muslim, maka tempat ibadah yang banyak tersedia adalah masjid dan mushola. Sedangkan untuk pemeluk agama selain Islam, penduduk dapat

beribadah di tempat ibadah yang tersedia di pusat Kabupaten Batang dan masih di sekitar wilayah Kecamatan Batang.

Dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana di Kelurahan Karangasem Utara seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan ibadah cukup lengkap meskipun terdapat beberapa sarana yang masih belum tersedia seperti tempat ibadah bagi umat agama Kristen/Protestan dan lainnya. Tersedianya sarana dan prasarana di Kelurahan Karangasem Utara ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

D. Kondisi Ekonomi Penduduk Kelurahan Karangasem Utara

Sebagai pusat Kabupaten, Kecamatan Batang termasuk di dalamnya adalah Kelurahan Karangasem Utara tentunya mempunyai sarana perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Batang. di Kelurahan Karangasem Utara banyak terdapat warung/toko/kios sebagai sarana lapangan usaha penduduknya. Selain itu, terdapat pula sarana perekonomian lainnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan lainnya. Di Kelurahan Karangasem Utara juga tersedia Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sarana kegiatan jual beli hasil laut oleh masyarakat lokal maupun luar daerah.

Tabel. 4.4

Jumlah Sarana Ekonomi di Kelurahan Karangasem Utara Tahun 2018

Sarana Ekonomi	Jumlah
Pasar Umum	0
Toko/Kios	959
KUD	1
Bank	2
BPR/BKK	0

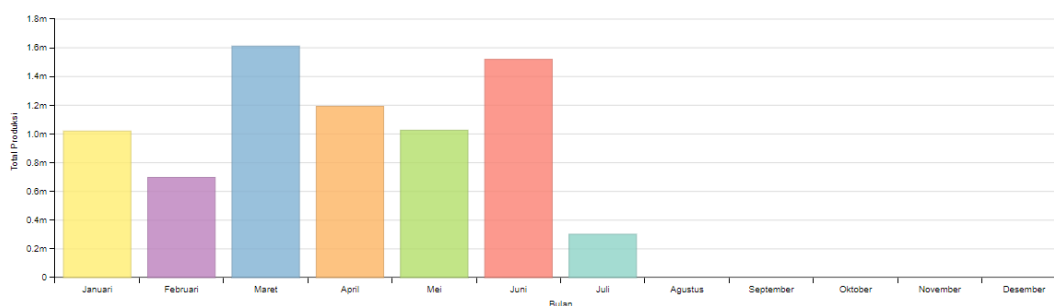
ATM	1
Jumlah	963

Sumber: Laporan Desa & SE2016

Perekonomian Kelurahan Karangasem Utara juga ditunjang oleh sumber daya alam yaitu hasil lautnya, baik yang masih segar maupun hasil pengolahan seperti fillet ikan, ikan asin, kerupuk rambak, dan ikan asap. Selain itu, banyak terdapat tempat galangan kapal karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Karangasem Utara khususnya laki-laki adalah sebagai nelayan.

Gambar. 4.3

Grafik Produksi Ikan di TPI Klidang Lor I Kelurahan Karangasem Utara Batang 2021



Sumber: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Sebagai wilayah yang mempunyai keistimewaan dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hasil lautnya, maka pemerintah Kabupaten Batang maupun pemerintah Kelurahan Karangasem Utara sadar bahwa hal tersebut harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan hasil tersebut tidak akan terlaksana apabila sumber daya manusia di Kelurahan Karangasem Utara masih belum paham bagaimana cara pemanfaatan hasil laut tersebut selain berupa ikan segar untuk dijual secara langsung. Maka dari itu pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan dorongan pemerintah Kabupaten Batang mengupayakan program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan pada dasarnya adalah suatu proses yang direncanakan dan terarah, memprioritaskan pemeliharaan potensi serta sumber daya lokal serta kreatifitas, ide gagasan, dan partisipasi masyarakat (Suparjan, 2003:24).

Pemerintah Kabupaten Batang dengan dibantu Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikhususkan untuk kelurahan dan desa di Kabupaten Batang yang berada di wilayah pesisir pantai. Program tersebut diberikan kepada pemerintah kelurahan untuk dilaksanakan serta disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing kelurahan. Dalam hal ini Kelurahan Karangasem Utara mempunyai beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuannya. Program-program di Kelurahan Karangasem Utara tersebut antara lain:

a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak berbeda dengan kelurahan lainnya di Indonesia, Kelurahan Karangasem Utara juga mempunyai Posyandu. Sejauh ini tidak ada program istimewa yang membedakan Posyandu Kelurahan Karangasem Utara dengan Posyandu lainnya. Hanya saja terdapat program tambahan yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi seperti kegiatan penyuluhan Covid-19 dan protokol kesehatannya. Selain program khusus, terdapat pula program utama dan pengembangan seperti Posyandu pada umumnya antara lain: program kesehatan ibu hamil, program kesehatan anak, keluarga berencana (KB), imunisasi, pemantauan status gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, tidak terkecuali PKK Kelurahan Karangasem Utara. PKK di Kelurahan Karangasem Utara ini sama seperti PKK pada umumnya di wilayah lain yang mempunyai tugas pokok tertentu. Adapun tugas pokok PKK antara lain:

- 1.) Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- 2.) Gotong royong
- 3.) Pangan
- 4.) Sandang
- 5.) Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- 6.) Pendidikan dan keterampilan
- 7.) Kesehatan
- 8.) Pengembangan kehidupan berkoperasi
- 9.) Kelestarian lingkungan hidup
- 10.) Perencanaan sehat

Dari tugas pokok tersebut, PKK Kelurahan Karangasem Utara juga membuat kegiatan rutin yang dilaksanakan selama satu kali dalam satu bulan. Kegiatan tersebut berupa arisan dan pengajian PKK. Kegiatan ini juga menjadi salah satu cara Pemerintah Karangasem Utara mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan nantinya. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan pertemuan dan perkumpulan semacam ini untuk sementara waktu tidak dilaksanakan atau kalau pun diadakan maka secara daring.

c. Pelatihan Pemberdayaan

Kelurahan Karangasem Utara mempunyai salah satu program yang cukup menarik yaitu pelatihan pemberdayaan. Program Pelatihan Pemberdayaan ini dilaksanakan secara rutin selama dua kali dalam satu tahun. Program Pelatihan Pemberdayaan ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Karangasem Utara dan kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dalam program ini difokuskan untuk melatih bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada di Kelurahan Karangasem Utara.

Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pelatihan pengolahan hasil laut seperti fillet ikan, pengasapan ikan, pembuatan ikan asin, kerupuk rambak, pembuatan tepung ikan, dan terasi. Kegiatan pelatihan pemberdayaan ini ditujukan bukan hanya untuk kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan ini sebagian besar berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dan sebagian lainnya dari Kelurahan Karangasem Utara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Jadi kegiatan pelatihan semacam ini kan mulanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, dan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebagian besar dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Kalo ditanya apa kami ada dana untuk program-program seperti itu ya saya jawab ada tapi kan ya berapa sih mbak, nggak banyak. Adanya ya ada, tapi nggak banyak. Dan saya juga nggak bisa nyebutin nominalnya berapa meskipun ada datanya di seksi administrasi, tapi itu cuma boleh diakses kami aja mbak untuk laporan dan mungkin evaluasi ke depan.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan pemberdayaan tersebut sangat memanfaatkan potensi hasil laut di Kelurahan Karangasem Utara. Dan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan sebagian besar berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Kegiatan pelatihan pemberdayaan tersebut selama pandemi Covid-19 ini untuk sementara waktu ditiadakan karena untuk mencegah penularan Covid-19. Namun untuk mengganti kegiatan pelatihan pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat setempat yang terdampak Covid-19.

d. Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kelompok Usaha Bersama atau KUB adalah *follow up* dari Program Pelatihan Pemberdayaan. Program ini dibuat untuk menindaklanjuti kemampuan yang sudah didapatkan dari Pelatihan Pemberdayaan. KUB dibentuk atas beberapa kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang setiap kelompoknya. Pengelompokkan ini bertujuan untuk membagi olahan yang akan dikelola nantinya untuk diperjualbelikan sebagai bentuk usaha.

Masing-masing kelompok akan dibagi atas satu jenis olahan hasil laut seperti yang telah dilatih sebelumnya pada kegiatan Pelatihan Pemberdayaan. Kelompok usaha bersama terdiri dari kelompok fillet ikan, kelompok

pengasapan ikan, kelompok pengolahan ikan asin, dan kelompok pembuatan kerupuk rambak/ikan. KUB tersebut kemudian mendapatkan modal awal yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dengan jumlah tertentu dan diawasi oleh Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Adapun penuturan dari Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara sebagai berikut:

“Kami ada KUB mbak, itu kelanjutan dari pelatihan pemberdayaan tadi. Jadi masing-masing sepuluh orang dibuat kelompok untuk membuka usaha salah satu dari jenis pengolahan hasil laut yang sudah dilatih di kegiatan pelatihan pemberdayaan sebelumnya itu. Nah modal awalnya itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten tapi jumlahnya nggak bisa kami sebutkan secara gamblang. Terus KUB itu ya selalu kami awasi, kami pantau, meskipun kalo dimintai laporan bulanan itu susah sekali mbak padahal kan buat evaluasi kami juga.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara selalu mengawasi KUB, tetapi pengelola KUB sendiri dapat dikatakan kurang tertib dalam hal administrasi. Pengolahan hasil ikan dalam KUB kemudian diperjualbelikan dalam skala lokal hingga nasional. Pemasukan dari KUB tersebut kemudian dibagi kepada pengelola maupun anggota/pekerja yang ada.

Selama pandemi Covid-19, terdapat beberapa KUB yang masih aktif beroperasi dan ada pula beberapa yang tidak beroperasi untuk sementara waktu. Salah satu KUB yang masih aktif beroperasi di masa pandemi ini adalah KUB fillet dan penggilingan ikan di Dukuh Wukirsari RT 01/RW 09 Kelurahan Karangasem Utara. Meskipun tetap beroperasi di masa pandemi, namun distribusi yang dilakukan hanya ½ (setengah) dari jumlah biasanya ketika sebelum pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dipungkiri jika omset

juga mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Yani selaku pengelola KUB fillet dan penggilingan ikan:

“Selama Covid ini alhamdulillah dari kapal tetep masok barang ke kita jadi kita bisa tetep kerja mbak. Karena kita itu kerjanya mengikuti hasil tangkapan dari kapal, kalo ndak ada barang ya kita ndak kerja. Dan emang selama Covid ini pengiriman cuma bisa ½ dari biasanya soalnya terkendala di lockdown-lockdown itu si mbak jadi susah juga. Ya kalo pengiriman cuma ½ ya berarti omset otomatis turun mbak. Tapi ya ndakpapa mau gimana lagi, yang penting masih tetep bisa menghasilkan.” (Yani, Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengolahan fillet dan penggilingan ikan menyesuaikan hasil dari tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Karena sangat bergantung pada TPI, jika tidak ada pemasokan ikan dari TPI maka tidak ada pengolahan atau libur produksi. Namun sebaliknya, jika pemasokan dari TPI berjumlah besar maka pengolahan ikan dan jam kerja disesuaikan dengan jumlah tersebut. Kegiatan pengolahan ikan ini dimulai dari pukul 6 (enam) pagi hingga selesai sesuai pasokan yang tersedia.

Dalam KUB ini terdapat 68 (enam puluh delapan) pekerja yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) perempuan dan 12 (dua belas) laki-laki. Para anggota/pekerja ini ada yang berasal dari Kelurahan Karangasem Utara dan ada juga yang berasal dari Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman Batang. Mayoritas anggota/pekerja adalah perempuan dan merupakan seorang ibu rumah tangga. Perempuan mempunyai bagian untuk memfillet ikan, dan laki-laki di bagian pengepakan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Yani selaku pengelola KUB fillet dan penggilingan ikan:

“Di sini itu kebanyakan perempuan mbak yang ngolah ikannya, nah yang laki-laki itu di bagian pengepakan. Kebanyakan juga ibu rumah tangga, atau malah hampir semuanya kayaknya ibu rumah tangga.

Dulu ada si yang masih muda gitu tapi sekarang udah nikah jadi ndak di sini lagi. Di sini pekerjaanya ada yang dari sekitaran sini aja sama ada juga yang dari Ujungnegoro. Kita juga kerjanya ndak tiap hari mbak, ya pokoknya nyesuaikan TPI aja. Kalo ada barang ya kita kerja, ngga ada barang ya libur. Jamnya juga sama, disesuaikan sama barang.” (Yani, Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Jenis ikan yang diolah adalah Ikan Kuniran, dan limbah dari olahan ikan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi makanan unggas khususnya bebek. Sehingga pengolahan ikan ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan karena limbahnya yang dapat dimanfaatkan kembali. Dalam KUB fillet dan penggilingan ikan ini dapat menghasilkan kurang lebih 6 (enam) ton olahan ikan berupa fillet dan penggilingan ikan itu sendiri. Fillet dan gilingan ikan itu kemudian didistribusikan ke sekitar Kabupaten Batang dan luar kota seperti Temanggung, Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

KUB fillet dan penggilingan ikan yang dikelola Bu Yani ini adalah salah satu KUB yang masih bertahan hingga saat ini. Pasalnya ada juga KUB yang berjalan kurang baik atau bahkan berhenti beroperasi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, banyak yang akhirnya memilih untuk berhenti karena beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Betris selaku Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari:

“Sebetulnya fillet atau penggilingan itu nggak cuma ada di sini aja mbak, masih ada lagi. Tapi kan yang dikelola Bu Yani dan Pak Ilham ini salah satu yang sudah bertahan cukup lama sampai sekarang. Soalnya ada yang nggak bisa bertahan dengan alasan-alasan tertentu.” (Betris, Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari, 19 Juni 2021)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak semua KUB berjalan dengan baik. Sekalipun berjalan dengan baik, KUB tersebut kurang tertib administrasi yang berupa pembuatan laporan kepada Pemerintah

Kelurahan Karangasem Utara seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan dan KUB yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa program tersebut adalah salah satu program yang berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha dalam mempersiapkan masyarakat bersamaan dengan usaha untuk memperkokoh kelembagaan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Batang

Problematika kesenjangan yang menjadi realita dalam pembangunan membutuhkan pemecahan dengan berpihak pada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini tentunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Salah satu pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah dan seterusnya agar disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah.

Kebijakan adalah upaya pemecahan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 (empat) hal pokok yaitu: (1) taraf hidup masyarakat meningkat, (2) adanya keadilan: *by the law, social justice*, dan peluang prestasi serta kreasi individual, (3) diberikan kesempatan secara aktif dalam partisipasi masyarakat (dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi), (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Muhadjir, 2000: 15).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan khususnya pada

Pasal 5 Ayat 1 dan 2 merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sebagaimana bunyi Pasal 5 Ayat 1 & 2 yaitu:

“(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri”.

“(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; (b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; (c) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; (d) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; (e) pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau (f) penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya”.

Pemerintah Kabupaten Batang dalam menanggapi kebijakan Menteri Dalam Negeri tersebut juga telah merumuskan kebijakan perihal pemberdayaan masyarakat. Kebijakan terbaru yang telah dirumuskan untuk memperbaharui kebijakan tahun sebelumnya adalah Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang. Adanya kebijakan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di atas.

Dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang

Pasal 4 Ayat 2 lebih diuraikan lagi mengenai jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pasal 4 Ayat 2 berbunyi:

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: (a) Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi: 1. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, 2. Keluarga berencana, 3. Pelatihan pengembangan sumber daya manusia kader posyandu, dan/atau 4. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan; (b) Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi: 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja, 2. penyelenggaraan kursus seni budaya, dan/atau 3. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan; (c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah), meliputi: 1. Pelatihan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah), dan/atau 2. Pelatihan pengembangan usaha mikro lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan; (d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi: 1. Pelatihan pemberdayaan masyarakat kelurahan, 2. Pelatihan kader penggerak pembangunan kelurahan, 3. Pelatihan pengembangan PKK, dan/atau 4. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya; (e) Pengelolaan ketenteraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat, meliputi: 1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan, 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan, 3. Sosialisasi hukum ketenteraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat, dan /atau 4. Pengadaan/penyelenggaraan/ sosialisasi ketenteraman/ ketertiban umum/ perlindungan/ justify masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan; (f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, meliputi: 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana, 2. Pelatihan dan pembentukan pemuda siaga bencana, 3. Edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan/atau 4. Pelatihan/penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan”.

Berdasarkan dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat disimpulkan bahwa secara tertulis konsep yang direncanakan pemerintah sangat efektif dan efisien. Namun dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah di bawahnya menanggapi kebijakan tersebut dengan implementasinya terhadap masyarakat di lapangan. Karena *output* dari suatu kebijakan tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara kemudian merancang beberapa program pemberdayaan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya. Selain itu, hal ini juga telah menjadi salah satu program kerja Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Adapun program kerja Kelurahan Karangasem Utara sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan pasarana aparatur
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3. Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Dalam merancang dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan, pemerintah setempat atau pihak terkait tentunya mempunyai langkah-langkah dari mulai pengenalan program kepada masyarakat hingga evaluasi. Dan proses tersebut membutuhkan strategi-strategi yang tepat agar dapat sampai kepada masyarakat. Terlebih lagi masih adanya *stereotype* negatif yang melekat terhadap perempuan yang berkegiatan di ranah publik membuat pemerintah dan pihak terkait memikirkan cara yang efektif dan efisien.

Di dalam suatu proses pembangunan partisipatif semacam pemberdayaan masyarakat, terdapat elemen yang turut andil di dalamnya seperti Lurah, penanggung jawab, pengelola, serta kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Maka dari itu, perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atas partisipasinya dalam pembangunan. Wujud partisipasi tersebut berupa gagasan serta kegiatan yang ada dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam hal ini mempunyai beberapa cara atau strategi untuk memobilisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi yang disusun tentunya telah disesuaikan dengan karakter masyarakat Kelurahan Karangasem Utara agar tersampaikan dengan baik. Strategi atau tahapan tersebut antara lain:

a. Sosialisasi awal

Sebelum memulai pelaksanaan program pemberdayaan, Pemerintah Karangasem Utara terlebih dahulu melakukan sosialisasi awal untuk mengenalkan program-program yang akan dilaksanakan ke depannya kepada masyarakat setempat. Dalam sosialisasi awal ini pemerintah Karangasem Utara tidak hanya menargetkan pada laki-laki saja, tetapi perempuan juga ditargetkan untuk memperluas penyebaran informasi. Mulanya sosialisasi awal ini dilakukan kepada organisasi atau perkumpulan yang ada di masyarakat seperti kelompok pengajian, arisan, atau PKK dan Posyandu.

Hal ini bertujuan agar informasi terkait program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dapat meluas minimal dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat yang ikut dalam sosialisasi tersebut secara tidak langsung dapat menjelaskan atau bahkan mengajak orang lain untuk ikut berpartisipasi. Dalam sosialisasi ini, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan pemahaman bahwa ke depannya akan diadakan program pemberdayaan masyarakat seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal

tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Yang kami lakukan pertama itu mengenalkan program yang akan dilakukan kepada masyarakat dengan menggandeng kelompok-kelompok atau perkumpulan warga seperti pengajian atau arisan. Lalu pasti kan berita itu menyebar dengan masif kepada masyarakat karena kita ini kan masih suka guyub antar tetangga. Jadi tanpa sadar mereka ini sudah ikut menyebarluaskan informasi kepada orang-orang yang mungkin belum bisa atau bahkan tidak bisa kami jangkau sebelumnya.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama atas informasi yang diperoleh pada sosialisasi awal program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, serta mempunyai peran yang sama untuk turut aktif membagikan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya di Kelurahan Karangasem Utara.

b. Musyawarah

Musyawarah ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan nantinya. Karena Program Pelatihan Pemberdayaan dilaksanakan setiap dua kali dalam satu tahun, maka terkadang kegiatan musyawarah ini digabungkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang dilakukan di awal tahun. Kegiatan musyawarah ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat yang akan diadakan nantinya.

Dalam hal ini, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak

program adalah hasil dari kesepakatan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Musyawarah ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam program pemberdayaan yang nantinya akan dilaksanakan. Karena mampu tidaknya masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Mau di Musrenbang atau musyawarah lainnya, kami harap semua lapisan masyarakat itu ya ikut aktif. Mau itu laki-laki apa perempuan kan sama saja wong sama-sama punya hak punya kesempatan juga. Tapi ya kembali lagi pada individunya ya. Tapi jujur aja untuk perempuan sendiri itu lumayan alot buat diajak musyawarah. Meskipun mereka ikut hadir di musyawarah, tapi kebanyakan dari mereka itu pasif mbak. Memang ada satu dua orang yang memberi saran, tapi jarang sekali ada.” (Endang. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Dari penuturan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berupaya agar pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan suara laki-laki saja tetapi suara perempuan juga sangat diperhitungkan. Namun, yang menjadi kendala adalah masih banyaknya perempuan yang belum berani menyuarakan pendapatnya dalam musyawarah tersebut. Dan dari pelaksanaan musyawarah tersebut mayoritas dihadiri oleh kaum laki-laki.

c. Pengorganisasian

Di dalam tahap pengorganisasian terdapat penyusunan program, pelaksanaan program, dan pemetaan *output* dari program tersebut. Setelah pemerintah mengetahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan hal tersebut disetujui dalam musyawarah, maka selanjutnya adalah penjabaran dari program yang telah disepakati bersama. Bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang dapat berpartisipasi, berapa dana yang dibutuhkan, alat apa

yang diperlukan, bagaimana sistem administrasinya, kelemahan dan kelebihan dari program, semuanya dijabarkan agar ke depannya kegiatan tersebut akan terorganisasikan dengan efektif dan efisien.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan pihak terkait atau dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang kemudian melaksanakan rapat untuk membahas hasil musyawarah sebelumnya dan penyusunan program. Seperti penuturan dari Bapak Khuzaeni selaku Lurah Karangasem Utara:

“Jadi kalau musyawarah kan hanya pemerintah kelurahan dan masyarakat saja yang menghadiri, dan pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan itu tidak ikut bergabung dalam musyawarah. Setelah urusan dengan masyarakat selesai, barulah kami melakukan rapat dengan dinas. Di situ membahas hasil musyawarah dan detail programnya itu mau seperti apa. Jadi istilahnya kami itu hanya penyambung lidah antara masyarakat dengan dinas begitu.”
(Khuzaeni, Lurah Karangasem Utara, 15 Juni 2021)

Setelah selesai dengan penyusunan program, kemudian program tersebut dilaksanakan. Dan dalam pelaksanaan program tersebut, dibutuhkan konsistensi masyarakat karena Program Pelatihan Pemberdayaan hanya diadakan selama dua kali dalam satu tahun. Dalam hal ini, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berusaha mengajak masyarakat untuk konsisten dalam pelatihan. Cara yang digunakan untuk mengajak masyarakat adalah dengan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan dukuh, RT, atau kelompok tertentu.

Koordinasi dan komunikasi tersebut dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa mereka selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta perannya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Khuzaeni selaku Lurah Karangasem Utara:

“Masyarakat kita ini kan memang agak susah untuk diajak konsisten dalam suatu hal ya mbak, makanya kami itu selalu memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat ini tetap konsisten dalam pelaksanaan program. Nah kalo yang kami lakukan sejauh ini hanya koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan dukuh, RT, atau perkumpulan, yang paling utama sih PKK ya karena memang cukup berdampak terhadap anggotanya. dan tidak jarang mereka juga bisa mengajak temannya yang lain yang bukan dari PKK. Yang melakukan koordinasi atau komunikasi itu kan tugasnya Bu Endang, jadi kalo ditanya itu berhasil atau tidak menurut saya ya sedikit banyak berhasil.” (Khuzani, Lurah Karangasem Utara, 15 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Karangasem Utara khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial cukup berhasil memobilisasi atau mengajak masyarakat untuk konsisten dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Setelah program pemberdayaan masyarakat berhasil dilaksanakan atau dalam hal ini Pelatihan Pemberdayaan, maka hal selanjutnya adalah pemetaan hasil dari program tersebut berupa KUB. Karena olahan hasil laut yang dihasilkan beragam, maka Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara beserta Dinas Kelautan dan Perikanan berinisiatif untuk membagi masing-masing KUB tersebut ke dalam satu jenis olahan hasil laut. Pemetaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaan hasil laut serta agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengolahan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Tadi kan sudah saya kasih tau tentang KUB to mbak, nah itu sebelum dibentuk KUB kan ada proses pemetaan dulu supaya teratur gitu mbak, masing-masing KUB memilih satu jenis olahan hasil laut apa yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan sebelumnya itu.”

(Endang, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa dilakukannya pemetaan hasil tersebut ditujukan agar KUB dapat lebih fokus pada satu olahan hasil laut sehingga menjadi lebih efektif serta efisien.

d. Tinjauan partisipatif

Tinjauan partisipatif adalah kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dari capaian program baik kualitas maupun kuantitas serta kinerjanya. Dalam tinjauan partisipatif ini di terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan selama satu kali dalam satu tahun pada saat Musrenbang Kelurahan Karangasem Utara. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan terkait sejauh mana program pemberdayaan (Pelatihan Pemberdayaan dan KUB) dapat memberdayakan masyarakat secara efektif serta efisien.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dikorelasikan dengan konsep mandiri, partisipasi, relasi kerja, serta keadilan. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat adalah tumpuan dari kesuksesan sebuah program yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, sehingga dalam hal ini masyarakat penting untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diagendakan (Hikmat, 2001: 3).

B. Keterlibatan Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Aktivitas Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Ketercapaian program-program pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program tersebut, tetapi juga harus dilihat dari proses dan kegiatan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna (Ife, 2008: 295). Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat dianalisis menggunakan konsep partisipasi tersebut. Dalam hal ini, Program

Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah salah satu wujud dari program pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat selaku subjek dalam pembangunan di Kelurahan Karangasem Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan program-programnya berupa Pelatihan Pemberdayaan dan KUB berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan minimal di wilayah mereka sendiri secara lebih bermakna. Keberhasilan cita-cita dan tujuan perlu dinilai dari kegiatan partisipasi perempuan, sehingga dalam hal ini perlu adanya tinjauan dengan lebih mendalam dari wujud partisipasi perempuan.

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) diwujudkan dengan aktivitas mereka pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam hal ini wujud partisipasi perempuan tersebut yaitu:

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Karangasem Utara mempunyai 2 (dua) tahap yaitu sosialisasi awal dan musyawarah. Dalam kegiatan sosialisasi awal dan musyawarah, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berusaha untuk mengajak masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk ikut terlibat secara aktif. Pada kegiatan sosialisasi awal, mayoritas peserta yang hadir merupakan perempuan. Hal ini dikarenakan komunitas yang banyak mendapatkan perhatian sebelumnya adalah anggota PKK, dan dari anggota tersebut juga aktif mengajak atau menginformasikannya lagi kepada orang lain di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Pokoknya kami mengusahakan agar semua masyarakat itu ikut terlibat mbak, minimal hadir dalam sosialisasinya. Yang penting mereka tau di daerah mereka tinggal itu mau ada kegiatan apa.

Makanya kami juga menggandeng PKK dari awal agar ada satu kelompok yang setidaknya bisa dipegang dan diandalkan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri kalo keterlibatan perempuan itu masih tergolong belum aktif kalo di pertemuan-pertemuan seperti itu. Mereka hanya aktif mendengarkan dan mengurus konsumsi saat pertemuan tersebut. Yang aktif di pertemuan-pertemuan itu biasanya laki-laki, mau pas sosialisasi atau musyawarah itu laki-laki. Perempuan ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat tapi nggak sebanyak yang laki-laki.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Dari penuturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta yang hadir pada sosialisasi adalah kaum perempuan, tetapi partisipasinya masih terbilang pasif. Kehadiran perempuan dalam sosialisasi tersebut hanya sebatas menjadi pendengar dan mempersiapkan konsumsi untuk kegiatan tersebut, dan hanya beberapa yang sesekali bertanya, menyampaikan kritik, atau mengungkapkan gagasannya.

Selain sosialisasi, tahap selanjutnya adalah musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat Kelurahan Karangasem Utara. Selain belum aktif dalam menyuarkan pendapat, pada tahap musyawarah ini kehadiran perempuan juga lebih sedikit daripada laki-laki. Dalam tahap musyawarah, laki-laki lebih dominan baik dari prosentase kehadiran maupun keaktifan menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Sama aja mbak mau di tahap sosialisasi atau musyawarah, mayoritas suara itu dari laki-laki. Malah kalo pas musyawarah itu perempuan yang hadir jauh lebih sedikit. Jadi kalo musyawarah ya kebanyakan yang hadir laki-laki. Mungkin itu karena ada yang ngurus rumah atau anak jadi nggak sempet untuk ikut musyawarah. Padahal kami mengadakan musyawarah itu pas malam hari, niatnya supaya lebih

banyak yang datang. Karena kan nggak semua masyarakat di sini punya waktu di pagi, siang, atau sore harinya.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara sering menyelenggarakan musyawarah di malam hari dengan tujuan agar masyarakat yang mempunyai kesibukan di pagi atau siang harinya dapat ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Namun realitanya, hal tersebut belum berhasil untuk mengajak partisipasi masyarakat terkhusus perempuan. Musyawarah masih didominasi oleh kaum laki-laki, baik secara prosesntase kehadiran maupun keaktifannya. Kehadiran dan keaktifan perempuan dalam musyawarah masih minim karena sistem patriarki yang masih melekat dengan perempuan yang menyebabkan perempuan disibukkan oleh urusan domestik rumah tangga.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dapat dikatakan bahwa perempuan mendapat bagian yang lebih besar daripada laki-laki baik pada Pelatihan Pemberdayaan maupun KUB. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini partisipasi perempuan lebih dominan dalam wujud tenaga pada saat Pelatihan Pemberdayaan, dan dalam pengolahan hasil laut di KUB. Selain itu, beberapa perempuan bertugas untuk membuat laporan yang kemudian diberikan kepada Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Ilham selaku Kepala Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan di Dukuh Wukirsari:

“Bisa dilihat sendiri kan mbak, mayoritas yang ikut mengolah ikan di sini ya perempuan ibu rumah tangga. Sebagiannya lagi laki-laki tapi tidak seberapa daripada yang perempuannya. Yang mengolah semuanya perempuan, yang laki-laki itu hanya di bagian pengepakan cuma ada 12 orang. Kalau di sini masih ada laki-lakinya, beda lagi kalau di KUB pengasapan ikan itu semuanya perempuan. Laki-

lakinya cuma ada beberapa buat angkat yang berat-berat.” (Ilham, Kepala Pengelola Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa pada masing-masing KUB, prosentase perempuan dan laki-laknya berbeda. Namun, dalam hal pelaksanaan secara umum baik pada Pelatihan Pemberdayaan dan KUB memang masih didominasi oleh kaum perempuan sebagai peserta aktif dan pekerja/pengolah meskipun belum tertib secara administrasi. Selain aktif sebagai peserta dan pekerja, perempuan juga banyak berkontribusi terhadap perluasan informasi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini berdampak positif pada prosentase masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada yaitu Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Betris selaku Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari:

“Ibu-ibu PKK di sini itu juga aktif mengajak teman-temannya yang sebelumnya nggak tahu tentang program-program dari kelurahan mbak. Makanya dari kelurahan juga PKK itu agak diandalkan, mungkin pak lurah atau Bu Endang udah bilang sebelumnya. Kami dapat peserta atau pekerja juga ya dari PKK meskipun nggak semuanya ya mbak. Emang kalo secara pekerjaan itu mereka aktif dan rajin, tapi kalo soal administrasi agak malas. Nggak jarang Bu Endang itu malah minta ke saya untuk memintakan ke KUB-nya.” (Betris, Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari, 19 Juni 2021)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara umum keterlibatan perempuan lebih dominan daripada laki-laki dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, baik pada Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Peran laki-laki dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berupa Pelatihan Pemberdayaan dan KUB secara prosentase lebih sedikit daripada perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena mayoritas laki-laki di Kelurahan Karangasem Utara lebih memilih untuk menjadi nelayan dan menjadi pemasok barang pada KUB tersebut.

c. Evaluasi

Tahap akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah evaluasi. Pada tahap ini, Pemerintah Kelurahan Karangsem Utara bersama dengan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat baik Pelatihan Pemberdayaan dan KUB akan membahas seputar capaian, dan hambatan selama pelaksanaan program tersebut. Evaluasi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang diadakan setiap satu tahun sekali. Sama seperti musyawarah yang diadakan sebelum pelaksanaan program, evaluasi juga dilakukan antara Pemerintah Kelurahan Karangsem dan masyarakat saja. Sedangkan untuk pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang mendapatkan informasi setelah evaluasi tersebut selesai.

Dalam kegiatan evaluasi, baik prosentase kehadiran maupun keaktifan didominasi oleh laki-laki. Seperti yang diungkapkan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial bahwa perempuan di Kelurahan Karangsem Utara cenderung sulit untuk diajak aktif dalam kegiatan rapat, musyawarah, atau pertemuan-pertemuan lainnya meskipun dalam pelaksanaan program para perempuan yang lebih dominan. Perempuan yang hadir dalam evaluasi cenderung memilih untuk menyiapkan konsumsi pada kegiatan tersebut daripada aktif menyuarakan pendapat. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Mereka itu ya kalo di dalam rapat, bicaranya seperlunya aja mbak. Kalo ditanya yang ada kaitannya sama mereka ya mereka jawab. Karena kan memang secara pelaksanaan para perempuan ini lebih dominan daripada laki-lakinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa perempuan yang menyuarakan pendapat itu ya ada, Cuma hanya satu dua orang dan itu jarang sekali. Mungkin ya karna itu tadi, mereka memilih untuk mengurus rumah daripada datang ke

pertemuan-pertemuan seperti itu. Padahal itu untuk kebaikan mereka juga karena sebagian besar yang menjalankan program itu kan mereka sendiri.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan pada proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat daripada proses perencanaan dan evaluasi. Para perempuan di Kelurahan Karangasem Utara mempunyai alasan tersendiri yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi tersebut.

Partisipasi adalah keterlibatan mental serta emosional individu pada kondisi kelompok yang mendukung individu tersebut untuk turut andil memberikan kemampuan dalam meraih cita-cita kelompok dan turut bertanggungjawab atas cita-cita kelompok tersebut (Suparjan dan Hemptri Suyatno, 2003: 57).

Secara kuantitas, partisipasi masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara dalam tahapan aktivitas pemberdayaan terlihat lebih didominasi oleh laki-laki. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa prosentase kehadiran dan keaktifan dalam proses perencanaan serta evaluasi didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan hanya aktif dan mendominasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal ini disebabkan karena adanya beban ganda yang dimiliki perempuan yaitu sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga.

Adanya beban ganda tersebut menyebabkan perempuan cenderung sulit untuk aktif dalam aktivitas musyawarah atau diskusi mengenai perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang ada. Perempuan juga cenderung lebih memikirkan kebutuhan domestik daripada kebutuhan publik, sehingga partisipasi dalam perencanaan serta evaluasi lebih didominasi oleh laki-laki, dan pada pelaksanaannya didominasi oleh

perempuan sendiri karena program tersebut juga menjadi salah satu media untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan ada yang didasarkan atas adanya kesadaran kritis, ada pula yang didasarkan atas ajakan orang lain. Perempuan yang memiliki kesadaran kritis terlihat dari keterlibatan secara aktif mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa keikutsertaan mereka juga dampaknya akan kembali lagi pada mereka. Sedangkan perempuan yang tidak memiliki kesadaran kritis, kegiatan partisipasi mereka hanya disebabkan atas dasar kebutuhan ekonomi atau bahkan keterpaksaan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB mempunyai faktor-faktor tertentu baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

Adanya program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara dalam wujud Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi media bagi partisipasi perempuan secara langsung terhadap pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, hal ini juga didukung dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Keinginan perempuan terhadap partisipasinya dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB yang ada di Kelurahan Karangasem Utara tidak luput dari adanya faktor pendorong. Berikut adalah faktor pendorong partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat antara lain:

1.) Kesadaran perempuan dalam membangun kelurahan

Pengelola, penanggung jawab, atau pihak lainnya yang mempunyai relasi dengan Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara adalah contoh kecil masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang mempunyai keterlibatan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara, mereka mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari aktivitas di Pelatihan Pemberdayaan dan KUB merupakan hal yang tidak mudah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah kesadaran untuk menjadi sebab awal atau faktor penentu sebagai pemicu untuk mengikutsertakan diri. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Betris selaku Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari:

“Pertama kan awalnya saya anggota PKK, terus waktu tau ada program dari kelurahan ada Pelatihan Pemberdayaan sama KUB jujur saya tertarik dari awal. Soalnya saya rasa memang masyarakat sini agak kurang perhatian dengan kemajuan RT atau dukuhnya jadi saya mulai tergerak hatinya. Nah saya selalu rajin ikut pelatihan pemberdayaan itu, tapi saya tidak ikut di KUBnya mbak soalnya saya punya pekerjaan sendiri. Setelah itu mungkin karena saya rajin ikut kegiatan itu dan saya juga anggota PKK atau karena ketua RT 01 itu mengundurkan diri, jadi saya dipilih untuk menjadi penanggung jawab RT 01 sekarang ini. Dan Bu Endang juga akhirnya kalo minta laporan KUB ya ke saya karena di RT 01 ini ada KUB fillet sama penggilingan ikan tadi.” (Betris, Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukirsari, 19 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa mempunyai kesadaran untuk memajukan daerah sendiri dapat mendorong perempuan untuk ikut serta dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Kesadaran untuk memajukan atau membangun daerah tempat tinggal adalah

faktor utama yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara.

2.) Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi

Salah satu program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara yang dapat menghasilkan pemasukan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program ini adalah *output* atau hasil dari program sebelumnya yaitu Pelatihan Pemberdayaan. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk terlibat dalam program tersebut. KUB mendapatkan pemasukan dari hasil pengolahan hasil lautnya yang kemudian diperjualbelikan. Dan dari sanalah masyarakat yang berpartisipasi dalam hal tenaga sebagai pekerja maupun pengelola mendapatkan penghasilan. Tidak sedikit pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan KUB tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Sayuti sebagai anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Saya itu sebenarnya bukan anggota PKK, juga bukan anggota kelompok apa-apa mbak.saya cuma warga biasa. Tapi tetangga saya itu kan ada yang ikut PKK, la saya dikasih tau kalo kelurahan ada program yang ada kerjanya. Saya jadinya ikut aja mbak buat bantu kebutuhan di rumah juga, soalnya suami saya juga kerjanya cuma ikut kapal.” (Sayuti, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa salah satu hal yang juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara adalah kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan yang harus dipenuhi dan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan sehingga mengharuskan perempuan ikut mencari nafkah dan tidak hanya mengandalkan suami saja. Hal ini juga sesuai dengan penuturan Ibu Nursiyam selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Saya ikut ini itu ya karena buat beli kebutuhan pokok mbak, buat makan. Soalnya bapak kan kerjanya ikut kapal, pulanginya ndak mesti. Jadi pas bapak berangkat ke lautnya lama kan saya juga butuh uang buat pegangan saya sama anak. Dulu taunya ada KUB itu ya dari istrinya temannya bapak orang kapal yang di Posyandu.” (Nursiyam, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

3.) Dukungan keluarga

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara salah satunya dipengaruhi oleh dukungan keluarga khususnya suami. Hal ini berhubungan dengan konsep sosial gender yang patriarkis dan dianut oleh masyarakat Jawa. Indonesia sebagai negara yang kaya oleh kebudayaan belum sepenuhnya terlepas dari budaya patriarki, fakta tersebut masih tetap bertahan meskipun gender telah mengalami perkembangan sebagai wacana dan juga negara telah menjadikannya sebagai arus utama kebijakan (Darwin: 200: 40).

Berdasarkan tradisi, tugas masing-masing anggota keluarga sangat diatur oleh figur kekuasaan laki-laki sebagai kepala keluarga yang secara tingkatan mempunyai wewenang paling tinggi dalam sebuah keluarga. Keadaan semacam ini akan mempunyai pengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal ini dikarenakan adanya dukungan atau persetujuan dari anggota keluarga yang lain khususnya suami membuat perempuan lebih nyaman untuk mengekspresikan diri dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara secara lebih maksimal. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Sukoningsih selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Awalnya ndak ada niatan buat gabung KUB mbak, cuma kok suami saya malah ndukung saya untuk ngelanjutin aja. Katanya yang penting saya ndak keteteran ngurus anak, mau ikut apa aja boleh yang penting bermanfaat. Kalo suami ndak ndukung saya ya saya ndak akan sampai gabung di KUB mbak kayaknya.” (Sukoningsih, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB masih menjadi kontrol laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam bidang apapun akan diperbolehkan oleh suami dengan menyanggupi syarat yang diberikan kepada istri, salah satunya adalah istri tidak boleh melupakan tugas utamanya yaitu mengurus anak. Sedangkan jika suami tidak memperbolehkan istri untuk kegiatan tertentu, maka istri tidak akan ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat baik Pelatihan Pemberdayaan maupun KUB.

4.) Kesempatan keikutsertaan perempuan

Adanya program pemberdayaan masyarakat seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara adalah salah satu peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Mutamimmah selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Saya merasa program ini bisa membantu ibu-ibu di sekitaran sini termasuk saya mbak. Saya yang awalnya ndak punya keterampilan setelah ikut ini jadi bisa ngolah, sekalian kerja juga.” (Mutamimmah, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Penuturan Ibu Mutamimmah juga linear dengan penuturan Ibu Setyowati selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Awale saya dikabari nek ada pelatihan dari kelurahan, kirain saya kan cuma buat bapak-bapak aja ya mbak. La kok ternyata semua

boleh ikut termasuk ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang ndak punya keterampilan apa-apa kayak saya ini ya akhire ikut lah mbak, wong berguna buat saya sama keluarga juga.” (Setyowati, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

5.) Faktor lingkungan yang mendukung

Faktor eksternal lainnya yang mendorong perempuan ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah adanya faktor lingkungan yang mendukung. Faktor tersebut dapat datang dari tetangga, teman satu perkumpulan, atau bahkan orang yang ditemui dalam aktivitas keseharian. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Siti selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Saya tau ini kan dari tetangga saya yang ikut PKK, kebetulan sering ketemu kalau belanja pagi itu. La saya diajak buat ikut juga katanya lumayan bisa buat kegiatan baru selain ngurus anak. Tetangga saya itu ya juga rajin ke rumah ngajak saya pas ada kegiatan, soalnya kan saya lupa mbak orangnya.” (Siti, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendorong partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak lepas dari adanya faktor pendorong baik secara internal maupun eksternal. Adapun faktor pendorong tersebut antara lain kesadaran perempuan untuk ikut serta membangun daerahnya, adanya kebutuhan ekonomi pribadi dan keluarga yang harus dipenuhi, adanya dukungan keluarga khususnya suami, adanya kesempatan keikutsertaan perempuan, dan adanya faktor lingkungan yang mendukung.

b. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendorong, partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB juga tidak lepas dari faktor penghambat partisipasi tersebut. Dalam partisipasinya, perempuan juga mendapatkan masalah atau kendala. Masalah dan kendala yang dihadapi perempuan dalam partisipasinya antara lain:

1.) Beban ganda yang dimiliki perempuan

Mayoritas perempuan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah seorang ibu rumah tangga. Perempuan yang kemudian memilih untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini kemudian juga mempunyai tugas untuk menjadi pencari nafkah dalam KUB. Beban ganda yang dimiliki perempuan ini tentunya menjadi salah satu hambatan bagi partisipasi perempuan, meskipun partisipasi perempuan dalam hal ini adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan sesuai apa yang dihasilkan di KUB tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Dwi selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Kendala yang dihadapi saya itu membagi waktunya mbak, antara mengurus rumah/anak sama di KUB itu. Kalo pelatihan pemberdayaan itu kan cuma 2 kali setahun, la tapi kalo KUB kan jalan terus selama ada pemasokan dari kapal. Jam kerjanya kan juga menyesuaikan barang jadi ndak tentu selesainya.” (Dwi, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Penuturan Ibu Dwi juga serupa dengan penuturan Ibu Asanah selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Kan sudah diniati ya mbak, jadi ya pinter-pinternya saya mbagi waktunya aja. Misale kalo pas barangnya ada banyak, berangkat jam 6 pulangnye ndak mesti. Sebelum berangkat itu saya ngurus rumah dulu apa masak apa yang lain. La nanti sisanya saya pesen sama anak saya kalo mau makan apa mau apa saya taruh di mana gitu mbak.”

(Asanah, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Dari penuturan tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri jika perempuan mempunyai beban ganda sehingga dalam mengekspresikan diri pada konteks pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat terkendala oleh faktor tersebut. Menjadi bagian dari KUB adalah pekerjaan yang tidak mudah, sehingga perempuan terkendala oleh beban ganda yang dimilikinya dalam pelaksanaan program tersebut. Tetapi dapat lihat juga bahwa beban ganda yang dimiliki perempuan tidak lantas menjadi kendala yang dapat menghentikan partisipasi mereka.

2.) Waktu pelaksanaan kegiatan

Program-program yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini perempuan juga mempunyai kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Hasta selau anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Kalo untuk rapat-rapat kayak gitu saya jarang datang mbak. Kendalanya kalo di sini itu rapatnya seringnya malem gitu si mbak, biasanya habis isya’ itu. La bayangin aja mbak, rapat mulai habis isya’ kadang juga molor itu selesainya kan bisa sampe tengah malem ya.” (Hasta, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Hal tersebut juga sesuai dengan penuturan Ibu Pawit selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Rapatnya kan seringnya malem itu mbak, jadi saya jarang ikut apalagi kalo ngepasin hujan mbak. Yang sering ikut itu suami saya, jadi nanti saya tau hasil rapatnya itu ya dari suami saya.” (Pawit,

Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Penuturan tersebut berbeda dengan penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Padahal kami mengadakan musyawarah itu pas malam hari, niatnya supaya lebih banyak orang yang datang. Karena kan nggak semua masyarakat di sini punya waktu di pagi, siang, atau sore harinya.”
(Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa waktu yang dinilai efektif dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah pembahasan program pemberdayaan masyarakat adalah pada malam hari. Pagi hingga sore hari dinilai bukan waktu yang efektif untuk mengadakan musyawarah karena perempuan mempunyai kewajiban untuk mengurus hal-hal domestik di rumah maupun kegiatan lainnya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menyebabkan perempuan untuk berhenti dalam berpartisipasi karena mereka masih tetap berusaha untuk aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat.

3.) Tingkat pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh tersendiri dalam proses pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin mudah bagi Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam mengedukasi masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendukung pengelolaan administrasi di program pemberdayaan. Namun, rata-rata perempuan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya KUB mempunyai tingkat pendidikan yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau maksimal Sekolah Menengah Akhir (SMA). Hal ini sesuai dengan

penuturan Ibu Endang selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial:

“Mayoritas yang bergabung itu kan ibu-ibu ya mbak. Ibu-ibu di sini pendidikan yang paling tinggi itu SMA dan dapat ijazah. Kalo kami perhatikan kan juga keterampilannya minim, apalagi berkaitan dengan administrasi. Ini memang salah satu tantangannya, makanya kadang kami maklumi saja dan berusaha lagi.” (Endang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, 15 Juni 2021)

Penuturan Ibu Endang di atas juga sesuai dengan penuturan Ibu Nur Hayati selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Kendala saya itu ya di urusan administrasi mbak. La saya SMA aja ndak lulus, kalo disuruh kerja yang ngolah apa ngolah apa gitu ya saya bisa. Tapi kalo administrasi itu kan ndak semuanya bisa walaupun semua anggota itu diajari dulu sebelumnya.” (Nur Hayati, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang demikian dapat berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kelurahan Karangasem Utara yang pada umumnya hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat memperlambat proses penerimaan informasi baru yang berkaitan dengan pengembangan program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dalam pembahasan mengenai faktor penghambat partisipasi perempuan di Kelurahan Karangasem Utara menunjukkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kendala dalam keterlibatannya. Kendala tersebut antara lain beban ganda yang dimiliki perempuan yaitu kewajiban mengerjakan urusan domestik rumah dan pencari nafkah, waktu pelaksanaan kegiatan musyawarah mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di

malam hari, dan tingkat pendidikan perempuan khususnya anggota KUB yang terbilang rendah.

Seperti yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB terdapat faktor pendorong yang menjadi motivasi perempuan untuk berpartisipasi, dan faktor penghambat partisipasi yang diakibatkan oleh kendala-kendala yang ada.

3. Manfaat yang diperoleh Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Program pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah salah satu program sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kelurahan Karangasem Utara. Program pemberdayaan masyarakat yang ada tentunya bertujuan untuk diberikan kepada masyarakat secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Adapun manfaat yang diperoleh perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB antara lain:

a. Peningkatan kapabilitas

Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB secara tidak langsung mendapatkan *privilege* yaitu peningkatan kapabilitas. Kapabilitas perempuan meningkat karena pada Pelatihan Pemberdayaan, perempuan mendapatkan ilmu seputar pengolahan hasil laut seperti fillet ikan, pengasapan ikan, pengolahan ikan asin, kerupuk rambak, dan yang lainnya. Sehingga perempuan yang pada awalnya hanya dapat memanfaatkan ikan yang masih segar untuk dimasak, akhirnya setelah mengikuti program tersebut perempuan dapat membuat olahan ikan lainnya yang dapat menghasilkan pemasukan baik untuk pribadi maupun kelompok. Hal ini

sesuai dengan penuturan Ibu Danumi selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Dulu saya kalo ngolah ikan itu ya cuma tak masak buat lauk mbak, mau belajar ngolah yang lain kan juga ndak punya alat-alatnya. La kok kebetulan di sini dilatih dulu, jadi saya kalo disuruh ngolah apa gitu ya bisa aja asal ada alatnya.” (Danumi, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Penuturan Ibu Danumi di atas juga linear dengan penuturan Ibu Mufidah selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Saya asline ndak ada keterampilan apa-apa mbak, bisa ngolah ikan ya di sini ini. Wong dulu nek saya dapat banyak ikan dari saudara yang kerja di kapal itu mending tak jual lagi daripada busuk.” (Mufidah, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan)

Berdasarkan penuturan tersebut perempuan di Kelurahan Karangasem Utara yang sebelumnya tidak mempunyai keterampilan dalam mengolah hasil laut, kemudian menjadi mempunyai beberapa keterampilan dalam mengolah hasil laut setelah ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB.

b. Peningkatan taraf perekonomian

Dengan adanya tindak lanjut dari Program Pelatihan Pemberdayaan berupa program Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadikan perekonomian sebagian masyarakat khususnya yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan barang atau olahan yang dihasilkan oleh KUB dapat menghasilkan pemasukan yang kemudian menjadi imbalan bagi anggota/tenaga kerja yang ada. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Puji selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Ya alhamdulillah ikut program pelatihan ini ada lanjutannya mbak jadi yang dilatih itu ndak percuma. Alhamdulillah juga saya sama suami jadi ndak keteteran bayar sekolah anak sama buat kebutuhan yang lain.” (Puji, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Penuturan Ibu Puji di atas juga sesuai dengan penuturan Ibu Rahmayani selaku anggota/tenaga kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan:

“Hasil dari ikut program ini saya kumpulin mbak buat buka warung, dan alhamdulillah sekarang udah punya warung sendiri, lumayan mbak walaupun ndak yang gede kayak toko-toko itu.” (Rahmayani, Anggota/Tenaga Kerja di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 17 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) menghasilkan manfaat kepada masyarakat secara umum khususnya perempuan. Program pemberdayaan masyarakat bermanfaat bagi perempuan secara materiil dalam bentuk uang dan non materiil dalam bentuk keterampilan. Perempuan merasakan manfaat dari partisipasinya berupa peningkatan kapabilitas sehingga mereka dapat mempelajari beberapa keterampilan dalam pengolahan hasil laut dan peningkatan taraf perekonomian sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

C. Kesetaraan Akses dan Kontrol Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Akses Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Akses menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk membuka ruang akses masyarakat dan memberikan layanan publik masyarakat terutama untuk kelompok minoritas.

Hal ini juga harus diimbangi oleh masyarakat yang bersama-sama proaktif menganalisis problematika, kebutuhan, serta potensinya maupun menganalisis sebuah ide untuk memecahkan masalah dan pengembangan potensi secara tersistem.

Pada program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara menunjukkan bahwa perempuan lebih mempunyai ruang dalam akses program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bentuk program yang berupa pelatihan dan pelaksanaannya yang lebih melibatkan perempuan. Pelatihan Pemberdayaan tersebut adalah pelatihan fillet ikan, pengolahan ikan asap, pengolahan ikan asin, pembuatan kerupuk rambak, dan pengolahan hasil laut lainnya.

Pada dasarnya semua masyarakat Kelurahan Karangasem Utara mempunyai peluang dan kesempatan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat memanfaatkan dan menikmati potensi yang ada di wilayah mereka.

2. Kontrol Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Program pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah contoh bentuk upaya dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Setiap individu dalam kelompok masyarakat memiliki peluang dan hak yang sama untuk melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan maupun proses pembuatan kebijakan. Masyarakat dilibatkan pada setiap proses kebijakan terutama dalam hal pembangunan. Dalam konteks pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Proses tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah kelurahan saja, akan tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara. Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB dilakukan oleh semua anggota yang berpartisipasi di dalamnya. Pengawasan dilakukan dengan cara pengelola tersebut membuat laporan yang kemudian akan diberikan kepada Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan maupun yang masih dan sudah terlaksana sebelumnya.

Meskipun semua masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam mengontrol program pemberdayaan masyarakat, namun perencanaan serta evaluasinya sejauh ini masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan kontrol pada pelaksanaannya didominasi oleh perempuan. Perempuan dalam hal ini lebih memilih partisipasi dalam bentuk tenaga pada pelaksanaannya dan memilih untuk menyerahkan proses perencanaan serta evaluasi kepada Pemerintah Karangasem Utara.

Berdasarkan atas uraian pembahasan di atas menunjukkan bahwa tidak adanya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pemberdayaan di Kelurahan Karangasem Utara yang mempunyai tempat dan porsi masing-masing. Dalam hal ini laki-laki mendominasi pada tahap perencanaan dan evaluasi sedangkan perempuan lebih mendominasi pada tahap pelaksanaannya. Hal ini berarti bahwa semua elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses dan mengontrol program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara.

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori partisipasi dalam konteks demokrasi yang dikemukakan Beetham bahwa masyarakat juga mempunyai

kesetaraan dan kontrol (*equality & control*) yang luas dalam proses berlangsungnya pemerintahan yang termasuk di dalamnya proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada, seluruh individu baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam partisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dalam pemberdayaan masyarakat yang juga melingkupi kesamaan hak-hak dalam akses serta kontrol terhadap hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah Pelatihan Pemberdayaan berupa pengolahan fillet ikan, pengolahan ikan asap, pengolahan ikan asin, pengolahan kerupak rambak, dan lainnya yang dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Selain itu sebagai *follow up* dari Program Pelatihan Pemberdayaan sebelumnya, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang membuat program Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang awalnya hanya terdiri dari 10 (sepuluh) orang setiap kelompoknya, kemudian hingga saat ini sudah

mengalami banyak perkembangan dan menghasilkan pemasukan yang tidak sedikit.

2. Keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB diwujudkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun dalam hal perencanaan dan evaluasi masih didominasi oleh laki-laki baik secara prosentase kehadiran maupun keaktifan, tetapi pada pelaksanaan program perempuan masih mendominasi baik secara prosentase kehadiran dan juga keaktifan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing mempunyai tempat dan porsinya tersendiri. Partisipasi perempuan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga mempunyai beberapa hambatan yang harus dilalui seperti; beban ganda yang dimiliki perempuan berupa pencari nafkah dan pengurus rumah tangga, waktu pelaksanaan kegiatan musyawarah yang mayoritas dilaksanakan di malam hari, tingkat pendidikan yang terbilang rendah dan berdampak pada pengelolaan administrasi yang kurang tertib pada program pemberdayaan masyarakat yang ada.
3. Pada dasarnya semua masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal akses serta kontrol terhadap program pemberdayaan yang ada sesuai dengan teori partisipasi dalam konteks demokrasi yang dikemukakan Beetham. Namun, dalam hal ini perempuan lebih memilih untuk berpartisipasi dan memanfaatkan potensinya pada tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi, laki-laki lebih mendominasi dan perempuan hanya berpartisipasi secara tenaga yaitu menyiapkan konsumsi kegiatan tersebut daripada aktif menyuarakan pendapat.

B. Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, serta kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Karangasem Utara, upaya untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi perempuan untuk lebih mempunyai kesadaran dalam berpartisipasi.
2. Kepada kaum perempuan di Kelurahan Karangasem Utara diharapkan untuk dapat lebih memberdayakan diri melalui peningkatan partisipasinya dalam proses pemberdayaan masyarakat terutama dalam proses perencanaan dan evaluasi yang hingga saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.
3. Kepada pengelola atau penanggung jawab program pemberdayaan, diharapkan untuk lebih tegas dalam mengorganisir anggotanya agar disiplin dan tertib administrasi yaitu membuat serta mengumpulkan laporan kepada Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara.

Daftar Pustaka

Buku

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press, 2011.
- Aziz, Moh. Ali, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Nusantara, 2005.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo, 2001.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-empat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Darwin, Muhadjir Muhammad. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grha Guru, 2005.

- Dwiningrum, Siti IA. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hikmat, Harry. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (*Community Development*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan, 1999.
- Mikklesen, Britha. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Muhadjir, Noeng. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Rafika Aditama. 2014.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

Jurnal dan Penelitian

- Amrizal, M. Hery. Dkk. Artikel Jurnal. "Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gjahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)". *Jurnal Pamator*, Vol. 9 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Brawijaya, 2016.

- Darmadi, S. Skripsi. "Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Betonisasi Jalan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Hettiari. Artikel Jurnal. "Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang". *Jurnal Elektronik Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Mritim Raja Ali Haji, 2016.
- Jenawi, Billy. "Evaluasi Program PNPM-MP di Pedesaan Kabupaten Bintan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol. 1 No. 2. Tegal: JIP Universitas Pancasakti, 2016.
- Juniarti, Tisa. Artikel Jurnal. "Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Riau, 2017.
- Kurniawati, Novita. Skripsi. "Partisipasi Perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Airlangga, 2017.
- Lestari, Anggraeni Munggi. Skripsi. "Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus)". Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Lugiarti, Eppy. Tesis. "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti". Fakultas Ekologi Manusia: Institut Pertanian Bogor, 2004.

- Maloko, M Thahir. Artikel Jurnal. “Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis”. *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 17 No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Martono, Edi. Dkk. Artikel Jurnal. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 1. Yogyakarta: Journal Universitas Gajah Mada, 2017.
- Mubarak, Z. Tesis. “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan”. Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah dan Kota: Universitas Diponegoro, 2010.
- Munafatunnisa, Malia. Skripsi. “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Simpan Pinjam bagi Perempuan di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)”. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Nas, Jayadi. Artikel Jurnal. “Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep Teori dan Aplikasinya”. *Jurnal WACANA: Jurnal Pemikiran Pascasarjana se-Indonesia*, Vol. 1 No. 1. Jakarta, 2005.
- Putra, Ikhsan Muharma. Artikel Jurnal. “Partisipasi Semua Perempuan Miskin dalam Program Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5 No. 1. Program Studi Pendidikan Sosiologi: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, 2015.
- Ramadhani, Emilia. Artikel Jurnal. “Peran Perempuan dalam Mengembangkan Program Pemberdayaan Perempuan melalui Multimedia (Studi Pendekatan Filantropi pada Akademisi Perempuan di Kota Medan)”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara, 2011.

Rinawati, Rini. "Partisipasi Wanita dalam Pemabngunan (Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat)". *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 20 No. 3. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Universitas Islam Bandung, 2004.

Sany, Ulfi Putra. Artikel Jurnal. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1. UIN Walisongo Semarang, 2019.

Setyawati, E. Yuningstyas & Andreas. Artikel Jurnal." Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Atma Jaya, 2013.

Referensi Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Kecamatan Batang dalam Angka 2019

Pemerintah Kabupaten Batang, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007.

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
www.fisip.walisongo.ac.id Telepon (024) 76435986; Website:

Nomor : B-350/Un.10.6/K/PP.00.9/2/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Zidna Azzahra
NIM : 1706016010
Semester : 8 (delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Batang, 23 Februari 2000
CP/e-mail : 087726943674/azzahrazidna00@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Kusrin/Nur Aenah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gajah Mada RT 03/RW 05 Kel. Kauman, Kec.
Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Februari 2021
An. Dekan
Kastur, Dekan Akademik

Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

(PEREMPUAN YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

1. Apa kegiatan keseharian anda?
2. Apakah anda ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat?
3. Sebagai apakah anda di dalam program pemberdayaan masyarakat?
4. Sejak kapan anda ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat?
5. Sudah berapa lama anda ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat?
6. Bagaimana anda dapat ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat?
7. Apa tujuan anda ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat?
8. Kegiatan apa saja yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat?
9. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan?
10. Bagaimana kerjasama antar pengurus dan anggota (pemerintah & masyarakat) di dalam program tersebut?
11. Seberapa sering anda ikut kegiatan dalam program tersebut?
12. Dalam wujud apakah anda berpartisipasi di dalam program tersebut?
13. Apakah anda turut menyumbangkan pendapat atau gagasan dalam rapat atau kegiatan yang ada di dalam program tersebut?
14. Bagaimana pendapat anda tentang partisipasi perempuan dalam program tersebut? Apakah menurut anda sudah maksimal atautkah belum?
15. Apa motivasi anda ikut ke dalam program tersebut?
16. Apakah suami atau keluarga anda mendukung keikutsertaan anda dalam program tersebut?
17. Apakah anda memperoleh imbalan/gaji dalam pelaksanaan program tersebut?
18. Apa kendala yang anda hadapi selama ikut serta dalam program tersebut?
19. Apakah suami atau keluarga anda pernah mengeluh atas keikutsertaan anda dalam program tersebut?
20. Apa usaha anda agar kendala tersebut dapat teratasi?
21. Apakah keikutsertaan anda dalam program tersebut mengganggu kegiatan keseharian anda?

22. Apa perbedaan yang anda rasakan sebelum dan sesudah ikut serta dalam program tersebut?
23. Apa manfaat yang anda peroleh selama keikutsertaan anda dalam program tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

(LURAH KELURAHAN KARANGASEM UTARA)

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara?
2. Bagaimana keterlibatan anda dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara ini?
3. Apakah dengan adanya program pemberdayaan tersebut sudah mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan?
4. Seberapa banyak perempuan Kelurahan Karangasem Utara yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut?
5. Bagaimana menurut anda partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Karangasem Utara selama ini? Apakah sudah maksimal atau belum?
6. Dalam bentuk apa perempuan Kelurahan Karangasem Utara berpartisipasi dalam proses pemberdayaan yang ada tersebut?
7. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan perempuan dalam program pemberdayaan tersebut?
8. Apa yang memotivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut menurut anda?
9. Bagaimana dukungan anda terhadap perempuan yang ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut?
10. Apakah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut memperoleh imbalan/gaji?
11. Faktor apa saja menurut anda yang menghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan yang ada tersebut?
12. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk dapat memobilisasi masyarakat agar mau terlibat dalam program pemberdayaan tersebut?
13. Apa usaha yang anda lakukan agar perempuan turut aktif berpartisipasi dalam proses pemberdayaan tersebut?
14. Dari mana alokasi dana untuk pemberdayaan tersebut? Jika dari dana desa, berapa jumlah atau prosentase dari dana/modal yang dimiliki Kelurahan Karangasem Utara?

15. Siapa saja yang dilibatkan untuk pengembangan pemberdayaan tersebut?
16. Apakah ada kerjasama dengan pihak di luar pemerintahan atau tidak? Jika ada, dengan siapa kerjasama tersebut dilakukan?
17. Apa yang sudah dihasilkan dari program pemberdayaan jika memang sudah berjalan?
18. Apakah dengan adanya program pemberdayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan?
19. Bagaimana perbedaan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
(SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KELURAHAN KARANGASEM UTARA)

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara?
2. Apakah ada peraturan khusus untuk kuota keikutsertaan perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana tingkat keterlibatan perempuan dalam siklus kegiatan program pemberdayaan tersebut?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi awal dalam kegiatan/program pemberdayaan di Kelurahan Karangasem Utara?
5. Bagaimana partisipasi perempuan dalam memberikan respon mengenai sosialisasi tersebut?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap program pemberdayaan tersebut?
7. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan dalam proses pemberdayaan tersebut?
8. Bagaimana partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan tersebut?
9. Apakah perempuan turut memberikan pendapat atau saran dalam proses pemberdayaan tersebut?
10. Dalam bentuk apa perempuan berpartisipasi dalam proses pemberdayaan tersebut?
11. Bagaimana menurut anda antusias perempuan terhadap program pemberdayaan tersebut?
12. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk dapat memobilisasi masyarakat agar mau terlibat dalam program pemberdayaan tersebut?
13. Bagaimana anda mengajak perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut?
14. Menurut anda faktor apa saja yang mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut?
15. Menurut anda faktor apa saja yang menghambat partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan tersebut?
16. Apa yang anda lakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan tersebut?

17. Dari mana alokasi dana untuk pemberdayaan tersebut? Jika dari dana desa, berapa jumlah atau prosentase dari dana/modal yang dimiliki Kelurahan Karangasem Utara?
18. Siapa saja yang dilibatkan untuk pengembangan pemberdayaan tersebut?
19. Apakah ada kerjasama dengan pihak di luar pemerintahan atau tidak? Jika ada, dengan siapa kerjasama tersebut dilakukan?
20. Apa yang sudah dihasilkan dari program pemberdayaan jika memang sudah berjalan?
21. Apakah dengan adanya program pemberdayaan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan?
22. Menurut anda bagaimana kemampuan perempuan dalam keikutsertaannya dalam program pemberdayaan?

Foto-foto Kegiatan



(Foto bersama setelah wawancara dengan Bapak Khuzaeni selaku Lurah Karangasem Utara, dan Ibu Endang selaku Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 15 Juni 2021)



(Foto ketika wawancara dengan Ibu Betris selaku Penanggungjawab RT 01 Dukuh Wukirsari Kelurahan Karangasem Utara, 19 Juni 2021)



(Lokasi KUB Fillet dan Penggilingan Ikan)



(Tempat Pengolahan di KUB Fillet dan Penggilingan Ikan)



(Proses Penimbangan Hasil Fillet dan Penggilingan Ikan)



(Proses Pemandahan Limbah Fillet dan Penggilingan Ikan)

CURRICULUM VITAE



Nama : Zidna Azzahra

TTL : Batang, 23 Februari 2000

Alamat: Jalan Gajah Mada RT 03/RW 05, Kelurahan
Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

NIM : 1706016010

Prodi : Ilmu Politik

Agama: Islam

Email : azzahrazidna00@gmail.com

Telp. : 087726943674

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Masyithoh Batang
2. SD Negeri Kauman 05 Batang
3. SMP Negeri 01 Batang
4. SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
5. S-1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Bidikmisi Community (BMC) Walisongo Semarang
2. Divisi Pendidikan dan Diskusi Kopma Walisongo Semarang
3. LKMM HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Dakwah Walisongo Semarang
5. Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Dakwah Walisongo Semarang
6. Sekretaris Umum Kohati Korkom Walisongo Semarang

7. Keluarga Duta Gemari Baca Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa
8. Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS)

PENGHARGAAN

1. Juara 1 Tata Upacara Bendera Orsenik UIN Walisongo Semarang (2018-Universitas)
2. Harapan 2 Duta Fisip UIN Walisongo (2018-Fakultas)
3. Favorit Duta Fisip UIN Walisongo (2018-Fakultas)
4. Nominator Duta Literasi Kohati (2018-Nasional)
5. Artikel Opini Online dengan Viewers terbanyak I Periode Bulan Maret (2018-Militan.co)